

REVIEW RENSTRA

DINAS PERTANIAN

TAHUN ANGGARAN 2024 - 2025



KATA PENGANTAR

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024-2026 sebagai penjabaran dari perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2023, Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2019-2024, serta adanya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri noor 050-5889 tahun 2021.

Hasil evaluasi tahun sebelumnya dipandang perlu untuk dilakukan Reviu Renstra Strategis (Renstra) dengan menyesuaikan perkembangan arah pembangunan dengan dukungan anggaran yang ada untuk lebih mengakomodir terhadap visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto periode 2024-2026. Evaluasi pelaksanaan pembangunan pertanian yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto

Secara operasional akan menjadi landasan dalam penyusunan Reviu Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dan sebagai pedoman yang digunakan sebagai bahan evaluasi telaahan untuk penyesuaian target indikator kinerja tahun sebelumnya dan pelaksanaan dari peraturan Kementerian Dalam Negeri. Reviu Renstra diharapkan mengikuti perkembangan yang ada, yang secara sistematis akan terwujud keselarasan dan keterpaduan dalam penjabaran program pembangunan pertanian di Kabupaten Mojokerto. Melalui berbagai kajian dan telaahan dapat merumuskan Reviu Renstra tahun 2024-2026 yang menggambarkan tujuan, sasaran strategis dan penyesuaian indikator kinerja untuk penyempurnaan jawaban dari masalah terhadap langkah-langkah dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Atas kerjasama semua pihak yang terkait, maka tersusunlah Reviu Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto tahun 2024-2026. Akhirnya disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Reviu Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, 29 Desember 2023

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Mojokerto



NURUL ISTIQOMAH, SE, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19711116 199703 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS PERTANIAN

Jl. RA. Basuni No. 17 Mojokerto, Jawa Timur 61361
Telp. 0321- 321228, Fax.. 0321-394067

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR: 188.45/ 130 /416-118/2023

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2024 – 2026 KEPALA DINAS PERTANIAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang lebih komprehensif yang memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Lainnya (IKL) yang belum tercakup dalam Renstra di Tahun 2022 yang lalu, maka dipandang perlu untuk mereviu kembali Rencana Startegis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024-2026 ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dilaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- c. bahwa sesuai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, perlu menetapkan Reviu Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024-2026 ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Reviu Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Memperhatikan

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 81 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017
13. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tanggal 26 Agustus Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN
MOJOKERTO TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2024 - 2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Mojokerto
- 2) Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto
- 3) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
- 4) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, desa dan kelurahan
- 5) Reviu Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 - 2026 yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Dinas Pertanian dengan berpedoman pada Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah serta memperhatikan RPJM Provinsi dan RPJM Nasional.
- 6) Rencana Kerja yang selanjutnya disebut RENJA adalah penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- 1) Reviu Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto
- 2) Reviu Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto ini

BAB III
PROGRAM DAN SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

- 1) Program dan kegiatan pembangunan pertanian di Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 – 2026 dilaksanakan sesuai Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto
- 2) Reviu Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN SKPD
BAB III	:	ISU-ISU STRATEGIS
BAB IV	:	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	:	STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	:	PENUTUP

BAB IV.
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah sesuai kewenangan yang dimiliki melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dari Reviu Renstra Perangkat Daerah

BAB V.
PENUTUP

- Pasal 6
- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto
 - 2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Mojokerto
Pada tanggal 29 Desember 2023

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Mojokerto





PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS PERTANIAN

Jl. RA. Basuni No. 17 Mojokerto, Jawa Timur 61361
Telp. 0321- 321228, Fax.. 0321-394067

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR: 188.45/131 /416-118/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2024 - 2026

KEPALA DINAS PERTANIAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka ditindaklanjuti oleh setiap Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 188.45/280/HK/416-012/2023 tanggal 3 Oktober 2023 Tentang Reviu RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Reviu Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.
- d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis sesuai SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) yang baru perlu dibentuk Tim Penyusun Reviu Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuka Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten'Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
11. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/280/HK/416-012/2023 Tanggal 03 Oktober 2023 Tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026

Memperhatikan :

1. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Kedudukan, Tata Kerja Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto
2. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 39 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto
3. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Nomor: 188.45/ 130/416-118/2023 tentang Reviu Rencana Strategis Dinas Pertanian

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 – 2026 yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Reviu Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas untuk mempersiapkan dan menyusun Reviu Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024-2026
- KETIGA** : Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada Tanggal : 29 Desember 2023

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Mojokerto



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 188.45/131/416-118/2023
TANGGAL : 29 Desember 2023

TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENTSRA)
DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2024-2026

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1.	Pembina	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto
3.	Sekretaris	Perencana Ahli Muda
4.	Tim Penyusun	a. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Kepala Bidang Perkebunan c. Kepala Bidang Peternakan d. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner e. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana f. Kepala Bidang Penyuluhan g. Kasubag Umum dan Kepegawaian h. KJF Kabupaten Mojokerto i. Analis Pembangunan Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Mojokerto



NURUL ISTIQOMAH



**REVIU RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2024 – 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

LAMPIRAN:
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR: 188.45/130/416-
118/2021 TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2024-2026;
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN NOMOR:
188.45/131/416-118/2021 TENTANG TIM PENYUSUN
REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTANIAN
TAHUN 2024- 2026

KATA PENGANTAR.....	Hal i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	7
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERNGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	12
2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.....	21
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	44
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat.....	48
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	57
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota	64
3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Pertanian.....	64
3.3.2. Telaah Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto	73
3.4. Telaahan Renstra Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	76
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	80
BAB IV.TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan.....	91
4.2. Sasaran.....	91

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	
5.1. Strategi dan Kebijakan SKPD.....	95
5.1.1. Strategi.....	97
5.1.2. Kebijakan.....	97
 BAB VI.RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	 100
 BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	 145
 BAB VIII. PENUTUP	 148
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan...	21
Tabel 2. Rekapitulasi Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023...	23
Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Golongan Tahun 2023.....	24
Tabel 4. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan.....	24
Tabel 5. Tabel T-C. 24 Analisis dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.....	27
Tabel 6. Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto sampai tahun 2020.....	30
Tabel 7. Luas Lahan dan Produktivitas Tahun 2016-2020....	35
Tabel 8. Tata Guna Lahan dan Jaringan Tersier Tahun 2016-2020	36
Tabel 9. Bantuan Alsintan Tahun 2016-2020.....	37
Tabel 10. Luas Tanam Perkebunan (Ha).....	38
Tabel 11. Luas Panen Perkebunan (Ha).....	38
Tabel 12. Produksi Perkebunan (Ha).....	39
Tabel 13. Produktivitas Perkebunan (Kg/Ha).....	39
Tabel 14. Tabel T-C. 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.....	40
Tabel 15. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian.....	50
Tabel 16. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	63
Tabel 17. Permasalahan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Renstra Kementerian Pertanian.....	69
Tabel 18. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Renstra Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, dan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.....	70
Tabel 19. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah.....	76

Tabel 20.	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Analisa KLHS.....	78
Tabel 21.	Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)...	80
Tabel 22.	Tabel T-B.35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	88
Tabel 23.	Tabel T-B. 36 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kabupaten Mojokerto.....	89
Tabel 24.	Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	93
Tabel 25.	Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	99
Tabel 26.	Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.....	106
Tabel 27.	Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD.....	146

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam proses penyusunannya, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani, yang dicapai melalui inovasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian. Sumber daya manusia bersama-sama dengan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan produksi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Sektor pertanian memegang peran yang cukup strategis dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Mojokerto karena sektor pertanian merupakan sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk dan penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Mojokerto. Kontribusi bidang pertanian terhadap PDRB Tahun 2020 yakni sebesar 7,96% . Sub kategori usaha pertanian, peternakan, perburuhan dan jasa pertanian merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah lapangan usaha dan mencapai 93,36%. Sub kategori tersebut juga masih dirinci lagi dan Tanaman Pangan merupakan kontributor terbesar terhadap pembentukan nilai tambah sub kategori usaha tersebut sebesar 37,06%, peternakan 29,89% dan perkebunan 15,40%, hortikultura 10,04% dan jasa pertanian 0,98% (Sumber : BPS Kab. Mojokerto Tahun 2020).

Penyusunan Reviu Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 - 2026 dimaksudkan untuk menjamin konsistensi pencapaian indikator kinerja pembangunan sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026. Sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RPJMD tersebut maka Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto berperan serta dalam pencapaian misi ke-2 Kabupaten Mojokerto yaitu ***“Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan”***

Dalam rangka mewujudkan pencapaian misi tersebut maka Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto berkontribusi dalam pencapaian tujuan Meningkatnya Kesejahteraan Petani Melalui Pengembangan agro bisnis dan agro industri sampai dengan Tahun 2026. Sebagai upaya menjaga sinergitas dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah maka dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto mengacu kepada dokumen RPJM Daerah Kabupaten Mojokerto 2021 - 2026, Berkaitan dengan hal tersebut maka reviu rencana strategis dinas merupakan turunan dari RPJMD yang secara spesifik memuat perencanaan mengenai upaya pencapaian sasaran bidang pertanian sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dengan demikian Renstra Dinas Pertanian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yaitu *“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”*

Fungsi dan kedudukan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto periode 2024-2026 adalah merupakan penjabaran visi, misi dan program dari RPJM Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dengan memperhatikan RPJP Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025. Reviu Renstra Dinas Pertanian 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto serta pedoman dalam penyusunan anggaran Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Karena berfungsi sebagai penjabaran RPJM Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021– 2026, maka isi dan substansi dari Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto ini wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam aturan perundangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; dan
2. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Maksud dan tujuan dari perujukan terhadap kedua aturan perundangan di atas antara lain adalah:

1. Mendorong Dinas Pertanian untuk menyusun rencana program dan kegiatan atas sebagian dari kewenangan Bupati Mojokerto di bidang Pertanian dasar dan menengah dalam rangka mencegah duplikasi program dengan kewenangan Gubernur di bidang yang sama.
2. Mendorong Dinas Pertanian untuk menyusun rencana program dan kegiatan yang masuk dalam batas tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencegah terjadinya duplikasi program dengan tugas pokok dan fungsi PD yang lain.

Proses penyusunan Reviu Renstra Dinas Pertanian ini dimulai dengan mengolah data dan informasi yang terutama berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi Dinas Pertanian, melakukan koordinasi di internal Dinas Pertanian dari masing-masing bidang melalui diskusi, melakukan proses musyawarah dengan melibatkan elemen stakeholder di Kabupaten Mojokerto serta menganalisa gambaran pelayanan termasuk analisa SWOT dan matrik strategi untuk menentukan kondisi saat ini dan jangka waktu 3 tahun ke depan yang tertuang melalui arah kebijakan dan strategi yang ditempuh.

Langkah berikutnya adalah melihat dari Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, menelaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), menganalisa hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan perumusan isu-isu strategis, visi, misi SKPD, tujuan pelayanan jangka menengah, perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Dinas Pertanian dan terakhir adalah penyusunan matrik runtutan untuk menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan, lokasi serta pagu anggaran indikatif.

Berdasarkan kondisi tersebut selama tiga tahun ke depan, Dinas Pertanian menempatkan padi, jagung, kedelai dan komoditas hortikultura sebagai komoditas pangan utama. Komoditas tanaman perkebunan utama seperti tebu, tembakau, kopi dan coklat juga menjadi prioritas utama selain tanaman pangan dan hortikultura. Demikian juga untuk produksi hasil peternakan seperti daging, telur dan susu juga merupakan indikator capaian kinerja yang ingin dicapai dalam 3 (tiga) tahun ke depan.

Pembangunan pertanian 3 (tiga) tahun ke depan juga dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis baik domestik maupun nasional yang dinamis sehingga menuntut produk pertanian yang mampu berdaya saing di pasar global. Untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian, maka dibutuhkan efisiensi di dalam sistem produksi, pengolahan dan pengendalian mutu serta kesinambungan produk.

Sampai saat ini masih banyak persoalan yang mendasar yang harus dipecahkan dan memerlukan penanganan yang cermat dan tepat seperti meningkatnya kerusakan lingkungan yang berdampak pada perubahan iklim global, terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air, kecilnya status dan kepemilikan lahan, belum optimalnya sistem perbenihan dan pembibitan, terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan masih banyak lagi.

Pembangunan pertanian ke depan juga menghadapi banyak tantangan yang tidak mudah, antara lain bagaimana meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk dengan sistem pertanian yang ramah lingkungan, membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan pembibitan, membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani, mengupayakan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's) yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran dan rawan pangan, menciptakan kebijakan harga (*pricing policies*) yang proporsional untuk produk-produk pertanian khusus, memperkuat kemampuan untuk bersaing di pasar global serta memperbaiki citra petani dan pertanian kembali diminati generasi penerus, memperkuat kelembagaan usaha ekonomi produktif di pedesaan, menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif dan memenuhi kebutuhan pangan, serta mengembangkan komoditas unggulan.

Begitu kompleksnya permasalahan, tantangan dan besarnya lingkup pekerjaan yang harus dilakukan dalam pembangunan pertanian, maka jelas bahwa pembangunan pertanian tidak bisa dilakukan hanya oleh Dinas Pertanian saja, akan tetapi pembangunan pertanian memerlukan dukungan dari semua pemangku kepentingan baik pemerintah pusat dan provinsi, dunia usaha, perbankan, lembaga pembiayaan bukan bank, organisasi

profesi dan kemasyarakatan, serta peran aktif dari semua petani, sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Dalam upaya mencapai target dan sasaran seperti diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang dihadapi selama ini serta menjawab tantangan di masa depan, maka strategi yang akan dilakukan Dinas Pertanian untuk 3 (tiga) tahun mendatang adalah dengan mengupayakan pengembangan hasil pertanian yang terintegrasi mulai dari hulu ke hilir serta mulai dari produksi, distribusi dan pemasaran dengan mengutamakan keberpihakan kepada petani dan masyarakat pengguna hasil pertanian.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Pertanian menyusun rencana Rencana Strategis Dinas Pertanian 2021 -2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi: visi, misi, tujuan, target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian periode 2021-2026 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait.

Sesuai dengan reformasi perencanaan dan penganggaran tahun 2024 -2026 yang mengharuskan merestrukturisasi program dan kegiatan dalam kerangka anggaran berbasis kinerja, dokumen perubahan renstra ini dilengkapi dengan indikator kinerja yang akuntabel untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi selama periode 2024-2026.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-undang No. 17 tentang RPJPN 2005-2025
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tmiur Tahun 2011-2031
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032
11. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Provinsi Tahun 2014-2019
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tanggal 26 Agustus 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan dari penyusunan Reviu Renstra Dinas Pertanian ini antara lain adalah:

1.3.1. Maksud

Menyediakan arah kebijakan pembangunan di bidang pertanian selama sisa waktu 3 tahun ke depan dengan penyesuaian dan perubahan dari Kemendagri 900.1.15.5-1317 tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2023. Sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, RKA Perangkat Daerah dan penetapan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024-2026 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik.

- b. Pedoman, acuan dan arahan bagi Dinas Pertanian dan seluruh stake holder dalam menentukan kebijakan, strategi pencapaian, program dan kegiatan di bidang pertanian.

1.3.2. Tujuan

Untuk menyediakan arah kebijakan pembangunan di bidang pertanian selama sisa waktu tiga tahun terakhir yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto, maka tujuan dari Reviu Renstra ini adalah:

- a. Menjabarkan kembali visi dan misi RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian
- b. Menetapkan rencana perubahan program dan kegiatan Dinas Pertanian yang disertai pendanaan indikatif selama 3 tahun mendatang.
- c. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pertanian selama 3 tahun mendatang.
- d. Menyediakan panduan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan
- e. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di setiap tahun anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Reviu Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 – 2026 disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto

- 2.1. Tugas, Fingsi dan Struktur Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto

Bab III Permasalahan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Isu-isu Strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dalam periode 2024-2026:

- 3.1. Identifikasi dan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan isu-isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto

Membahas mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto

4.1. Tujuan

4.2 Sasaran

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

5.1. Strategi

5.2. Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

6.2. Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto berkedudukan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pertanian memiliki tugas secara spesifik dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pertanian. Sebagaimana dalam landasan yuridis ditingkat daerah Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto mengacu pada peraturan Bupati Mojokerto No. 74 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto yang menjelaskan bahwa landasan yuridis tersebut memberikan gambaran dan arah kinerja organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto yang secara umum mempunyai tugas sebagai penyelenggara pemerintah di bidang Pertanian

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan peraturan Bupati Mojokerto No. 74 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Bidang Pertanian berdasarkan asas otonomi dan pembantuan yang diserahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pertanian
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanian
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian

- f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian ; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Dinas Pertanian dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, asset, penyusunan program dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi umum
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian
- c. Pengelolaan administrasi keuangan
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan
- e. Pengelolaan administrasi asset
- f. Pengelolaan administrasi rumah tangga
- g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan
- h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
- i. Pengelolaan kearsipan
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana
- k. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan pertanian
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian

2. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang tanaman pangan dan hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas meliputi produksi, perlindungan serta pengolahan hasil dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura. Bidang tanaman pangan dan hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Perumusan bahan kebijakan dibidang perbenihan, produksi tanaman pangan dan hortikultura
- b. Perumusan rencana kebutuhan dan penyediaan benih tanaman pangan
- c. Melakukan penyediaan alat dan bahan pengendalian OPT
- d. Melakukan inventarisir, investigasi terhadap gangguan OPT, pemantauan dan pengawasan terhadap alat dan bahan pengendalian OPT
- e. Melakukan pengembangan, pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok/regu pengendalian OPT
- f. Menyusun bahan penanganan dampak perubahan iklim tanaman pangan
- g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

3. Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian meliputi pengelolaan lahan dan air, pupuk dan pestisida serta alat dan mesin pertanian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Perumusan bahan kebijakan rencana kebutuhan dan penyaluran sarana produksi tanaman padi, palawija dan hortikultura

- b. Perumusan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi prasarana dan sarana tanaman padi, palawija dan hortikultura
- c. Perumusan bahan pembinaan penetapan tata ruang, investigasi dan pendayagunaan sumber daya lahan
- d. Perumusan rencana pengembangan dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

4. Bidang Penyuluhan

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian meliputi prasarana dan sarana penyuluhan, tata laksana penyuluhan serta pemberdayaan dan kelembagaan penyuluhan

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan dan program penyuluhan yang sejalan dengan kebijakan dan kebutuhan daerah
- b. Pelaksanaan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan
- c. Pelaksanaan penumbuhkembangan dan fasilitas kelembagaan dan forum kegiatan bagi petani/kelembagaan
- d. Perumusan bahan pembinaan dalam upaya meningkatkan kemampuan dan profesionalisme
- e. Pelaksanaan penerapan sertifikasi dan akreditasi jabatan fungsional penyuluh pertanian
- f. Perumusan dan pembinaan pada balai penyuluhan pertanian yang meliputi wadah, isi dan fungsi

- g. Perumusan program penyuluhan sesuai dengan kebutuhan petani/keompok usaha serta sesuai dengan kebijakan pusat dan provinsi
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

5. Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian meliputi perbenihan dan perlindungan perkebunan, produksi perkebunan serta pengolahan hasil dan pemasaran perkebunan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan bahan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan
- b. Perumusan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan
- c. Pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan
- e. Pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan
- f. Pelaksanaan penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan
- g. Pelaksanaan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan
- h. Pelaksanaan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan
- i. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

6. Bidang Peternakan

Bidang peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian meliputi perbibitan dan pengembangan kawasan, produksi dan budidaya serta usaha dan agribisnis

Dalam melaksanakan tugasnya bidang peternakan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan bahan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi dan budidaya peternakan, serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang di bidang peternakan
- b. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya genetik hewan
- c. Pelaksanaan pengendalianperedaran dan penyediaan benih/bibit hijauan pakan ternak
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak
- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi di bidang usah peternakan
- f. Pelaksanaan penataan dan perumusan teknik reproduksi dan pembibitan produksi ternak dalam rangka peningkatan mutu dan sumber benih
- g. Pelaksanaan penataan dan pengawasan teknik budidaya ternak
- h. Pelaksanaan penataan dan pengawasan sistem pengembangan dan penyebaran ternak
- i. Pelaksanaan pengelolaan redistribusi ternak dalam rangka penyebaran dan pengembangan ternak
- j. Pelaksanaan bimbingan penyiapan lokasi dan peternak

- k. Pelaksanaan penataan dan pengawasan dalam rangka pemanfaatan teknologi perbibitan, budidaya, pengembangan, penyediaan prasarana dan sarana peternakan
- l. Pelaksanaan penataan dan pengawasan dalam rangka penjagaan teknik mutu, produksi, penggunaan dan penyediaan pakan ternak serta kaji terap
- m. Pelaksanaan bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan
- n. Pelaksanaan pemantauan di bidang peternakan
- o. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- p. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

7. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian meliputi pengamatan dan penyidikan penyakit hewan, pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis peningkatan kesehatan hewan, pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan
- b. Pelaksanaan pengamatan, penyidikan, pemetaan epidemiologi penyakit hewan serta penerapan norma dan standar pelayanan kesehatan hewan dan laboratorium veteriner

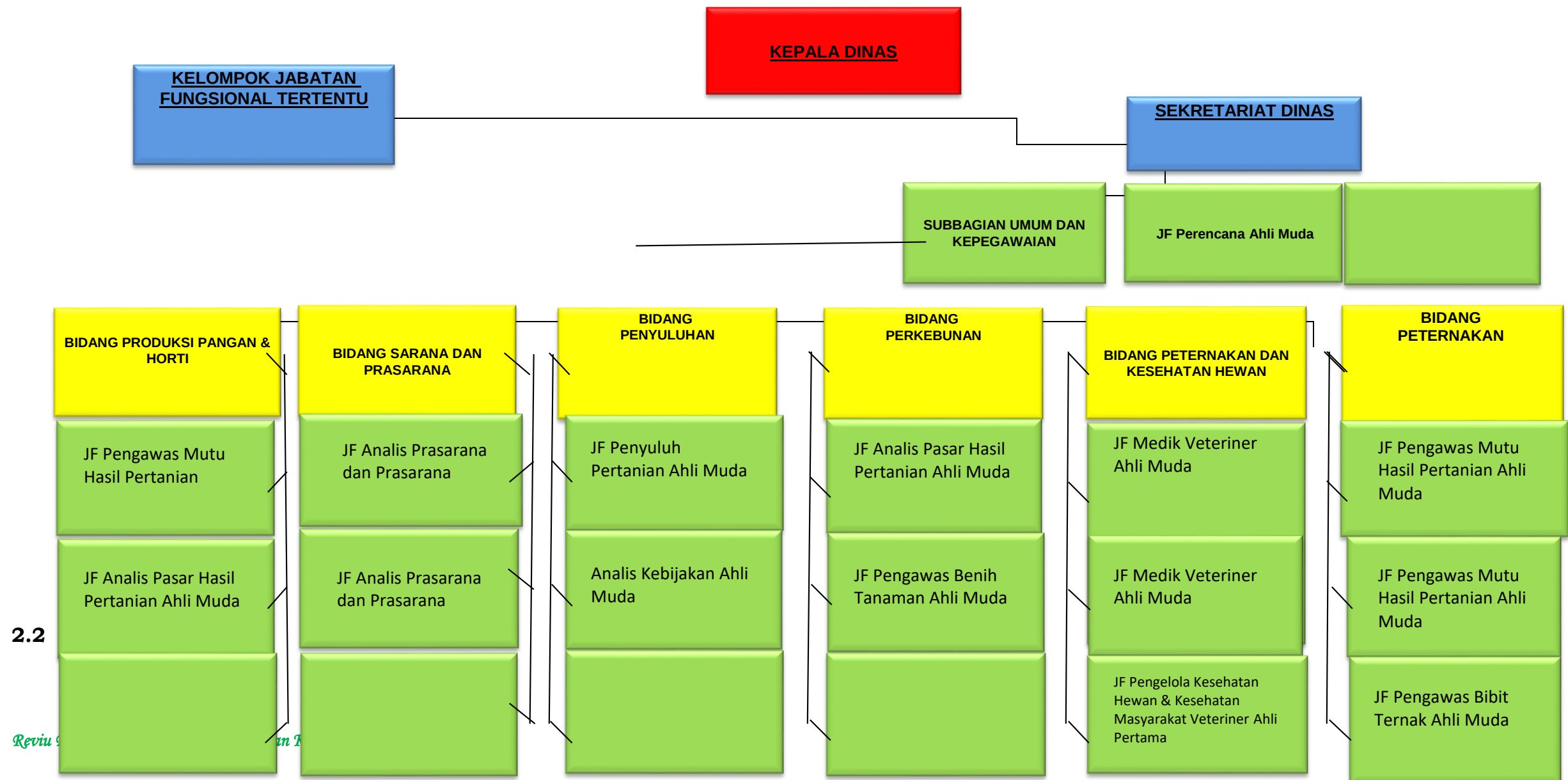
- c. Pelaksanaan pengawasan peredaran dan tata niaga hewan
- d. Pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan bahan asal hewan
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, penyidikan, peredaran penggunaan obat hewan, serta bimbingan dan pengawasan rumah potong hewan/unggas, prosedur tata cara pemotongan hewan, tempat pemerahan, pengolahan dan penyimpanan, tempat penjualan serta alat dan hasil produk asal hewan
- f. Perumusan bahan pelaksanaan penerbitan surat keterangan kesehatan hewan dan bebas penyakit menular, surat keterangan asal hewan yang keluar masuk daerah
- g. Pelaksanaan pembinaan orang/masyarakat yang terkait langsung dengan aktifitas usaha produk hewan, pembinaan terhadap unit usaha yang memproduksi, mengedarkan dan menyimpan produk hewan, baik yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor control veteriner serta pengawasan terhadap pengadaan, peredaran mutu alat dan mesin kesehatan hewan
- h. Perumusan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan dan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan
- i. Pelaksanaan pengamanan kelancaran terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan atau perubahan terhadap zoonosis, masalah kebersihan dan sanitasi lingkungan sebagai dampak bencana alam
- j. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional tertentu mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian sesuai dengan keahlian, ketrampilan dan kebutuhan.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian tertera dibawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI*



2.3 Sumber Daya Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsive, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, professional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang.

Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai tetapi juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan public yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah di masa mendatang adalah pemerintah yang cerdas yang mampu menterjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas. Terkait dengan hal tersebut diatas, jumlah aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto berdasarkan data dari Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sampai bulan Desember 2023 berjumlah 185 orang terdiri dari ASN 95 orang dan ASN P3K sebanyak 90 orang.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 1 dengan jenjang eselon II, Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto melaksanakan fungsi pelayanan di bidang pertanian

Tabel 1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jabatan Fungsional	Staf	Jumlah
1	Kepala Dinas		1					1
2	Sekretariat			1	1	1	14	17
3	Bidang Produksi Pangan dan Hortikultura			1	-	2-	2	5
4	Bidang Sarana dan Prasarana			1	-	1	1	3
5	Bidang Penyuluhan			1	-	2	-	3
6	Bidang Perkebunan			1	-	2	-	3
7	Bidang Peternakan			1	-	3	4	8
8	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			1	-	3	6	10
9	Fungsional (PPL)							50
10	Honorer Kantor							12
11	(ASN P3K)							90
	Jumlah							216

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diperta

Sekretariat memiliki jumlah pejabat pada eselon IV sebanyak 1 orang dan 2 jabatan fungsional dan jumlah karyawan yang lebih banyak daripada bidang yang lain, mengingat beban kerja di sekretariat yang cukup tinggi. Yang menjadi catatan dalam Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto adalah adanya jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Dinas Pertanian dan tidak terikat secara struktur dengan bidang-bidang. Beberapa bidang kekurangan tenaga administrasi (PNS) seperti bidang tanaman bidang perkebunan, bidang prasarana dan sarana, dan bidang penyuluhan. Beberapa jabatan fungsional masih ada kekurangan di bagian Sekretariat (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah), Bidang Prasarana dan Sarana, dimana Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian hanya 1 orang, Bidang Perkebunan hanya 2 jabatan fungsionalnya, Bidang Penyuluhan juga hanya 2 jabatan fungsionalnya

Kondisi kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Rekapitulasi Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Dinas		1	1
2.	Sekretariat	9	8	17
3.	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	2	3	5
4.	Bidang Perkebunan	0	3	3
5.	Bidang Prasarana dan Sarana	3	0	3
6.	Bidang Peternakan	6	2	8
7.	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4	6	10
8.	Bidang Penyuluhan	1	2	3
9.	Penyuluh Pertanian Lapangan	30	20	50
10.	THL Kantor	4	8	12
12.	ASN PPPK	58	32	90
	Total			185

Sedangkan Kondisi kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3
Rekapitulasi Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto
Berdasarkan Golongan Tahun 2023

No.	Golongan	ASN PNS	CPNS	Jumlah	%
1.	Golongan IV	23	-	23	23,47%
2.	Golongan III	64	-	64	65,31%
3.	Golongan II	10	-	10	10,20%
4.	Golongan I	1	-	1	1,02%
	Jumlah	98			100%

Kondisi kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	Jumlah
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	4	6	-	5	-	-	15
3	Bidang Produksi Pangan dan Hortikultura	-	2	2	1	-	-	-	5
4	Bidang Sarana dan Prasarana	-	2	-	1	-	-	-	3
5	Bidang Penyuluhan	-	3	-	-	-	-	-	3
6	Bidang Perkebunan	-	3	-	-	-	-	-	3
7	Bidang Peternakan	-	5	1	-	2	-	-	8
8	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan	-	-	6	2	2	-	-	10

	Masyarakat Veteriner								
9	Fungsional (PPL)	-	6	44		-	-	-	50
10	THL Kantor	-	-	8		4	-		12
11	ASN P3K	-	-	40	50	-	-	-	90
	Jumlah		24	105	54	13			185

Kapasitas dari kapabilitas karyawan berkaitan dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 3 tingkat pendidikan karyawan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto yang paling banyak adalah pendidikan S1 sebanyak 105 orang. Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto secara umum.

Jumlah karyawan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto yang menamatkan pendidikan S2 tercatat sebanyak 24 orang, S1 sebanyak 105 orang yang secara persentase, jumlah tersebut mencapai 69,73% dari seluruh karyawan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, hal ini tentu menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.

Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto adalah mengenai kuantitas dan kualitas pejabat fungsional. Sekalipun kebijakan internal Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah memperlihatkan keberpihakan terhadap pejabat fungsional, tetapi belum menarik minat pegawai lainnya untuk mengambil jalur karir sebagai pejabat fungsional.

a. Anggaran

Dari sisi anggaran, Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran 2016-2020 beserta serapannya sebagai berikut:

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	385.685.000	599.225.000	668.150.000	852.058.760	939.011.260	350.120.037	487.015.559	546.498.100	733.287.461	839.780.068	90,78%	81,27%	81,79%	86,06%	89,43%	26,15%	25%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1511.100.000	307.631.200	229.654.000	317.826.000	406.193.400	145.095.200	293.119.200	221.782.900	250.290.200	387.877.100	96,03%	96,28%	96,57%	78,75%	95,49%	36,11%	36,37%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	48.375.000	-	45.060.000	65.700.000	14.538.000	47.105.000	-	44.460.000	55.661.000	14.538.000	97,37%	-	98,67%	84,72%	100%	-33,01%	-37,17%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	32.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	9.810.000	28.050.000	8.800.000	10.000.000	7.115.300	9.810.000	87,66%	88%	100%	47,43%	100%	-13,34%	-11,49%
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	605.935.000	598.940.000	150.000.000	157.500.000	-	450.515.620	540.384.100	136.725.000	154.452.750	-	74,35%	90,22%	91,15%	98,07%	-	-63,32%	-10,44%

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	289.400.000	420.300.000	1.290.000.000	-	-	289.330.500	345.125.000	1.235.903.000	-	-	99,98%	82,11%	95,81%	-	-	38,04%	69,35%
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	24.037.278.821	29.212.390.550	33.056.000.000	-	-	16.640.798.343	27.816.779.750	31.872.857.700	-	-	69,23%	95,22%	96,42%	-	-	8,67%	20,43%
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	3.374.500.000	703.950.000	2.192.900.000	2.970.061.000	-	3.300.353.400	383.557.000	2.037.117.500	2.485.265.518	-	97,80%	54,49%	92,90%	84%	-	41,95%	66,18%
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	-	84.400.000	382.540.000	-	-	-	82.140.000	378.712.500	-	-	-	97,85%	99%	-	-	63,31%	65,25%
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	-	180.200.000	655.000.000	504.000.000	-	-	173.520.800	623.938.100	481.114.500	-	-	96,29%	95,26%	95,46%	-	60,11%	34,17%
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	-	195.200.000	1.633.000.000	-	-	-	192.683.100	1.489.417.000	-	-	-	98,71%	91,21%	-	-	159,14%	143,2%
Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	-	-	-	800.000.000	1.046.105.000	-	-	-	661.607.000	929.595.000	-	-	-	82,7%	88,86%	7,69%	10,13%
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian	-	-	-	2.849.000.000	367.459.000	-	-	-	2.696.583.016	333.779.000	-	-	-	94,65%	90,83%	-21,76%	-21,9%

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	-	-	-	993.560.000	-	-	-	-	811.310.000	-	-	-	-	81,66%	-	-25%	-25%
Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	-	-	-	-	817.755.000	-	-	-	-	731.004.368	-	-	-	-	89,39%	-	-
Program Peningkatan Produksi Perkebunan	-	-	-	-	917.863.000	-	-	-	-	207.425.500	-	-	-	-	22,6%	-	-
Program Peningkatan Produksi Peternakan	-	-	-	-	777.077.000	-	-	-	-	753.628.000	-	-	-	-	96,98%	-	-
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	-	-	524.242.000	-	-	-	-	482.222.040	-	-	-	-	91,98%	-	-
Program Penyuluhan Pertanian	-	-	-	-	412.640.000	-	-	-	-	386.632.500	-	-	-	-	93,70%	-	-

Alokasi anggaran berbanding lurus dengan serapan anggarannya, akan tetapi selama 5 tahun berjalan alokasi anggaran setiap tahunnya mengalami fluktuasi yang sangat tajam. Hal ini dipengaruhi oleh terbentuknya OPD baru pada tahun 2017 dimana 3 (tiga) dinas bergabung menjadi satu yaitu Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Dinas Perkebunan dengan masing-masing anggaran yang berasal dari ketiga dinas tersebut. Maka pada tahun berikutnya anggaran dan kegiatan disesuaikan dengan banyaknya bidang dan kebutuhan masing-masing bidang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanian. Munculnya beberapa program baru dipengaruhi oleh penerapan SAKIP dimana untuk menunjang dan mendukung pencapaian indikator dari komoditas utama, masing-masing bidang harus mempunyai program dan kegiatan yang kompeten.

b. Aset, Sarana dan Prasarana

Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto menempati kantor yang berdiri diatas lahan seluas 1.750 m² milik Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang beralamat di Jl. RA Basuni 17 Sooko Mojokerto. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Pertanian dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 6.
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian
Kabupaten Mojokerto Sampai Tahun 2023

Rekapitulasi Sarana dan Prasarana					
No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang		
			B	KB	RB
1	Kendaraan roda 4	8	8	-	-
2	Kendaraan roda 2	114	23	80	11
3	AC	12	12		
4	Lemari	32	32		
5	Filling Cabinet	8	8		
6	Brankas	2		2	
7	Meja	54	30	24	
8	Kursi	410	410		

9	Pesawat telp/fax	2	2		
10	Mesin Ketik	4	4		
11	Komputer PC	16	16		
12	Note book/laptop	8	8		
13	Printer	30	30		
14	Scanner	1			1
15	Projector	6	6		
16	Camera	5	5		
17	Handycam	2	2		
18	White Board	3	3		
19	Sound system	7	7		
20	Traktor roda 2	1.615	1517		98
21	Traktor roda 4	5	5		
22	Transplanter	40	40		
23	Hand sprayer	7176	6.802		374
27	Sabit bergerigi	1.933	1.810		123
28	Paddy mower	159	159		
29	Combine Harvester	22	22		
30	Thresher Padi	983	928		55
31	Cornsheller	123	114		9
32	Thresher Kedelai	32	31		1
33	Perontok Multiguna	143	142		1
34	Small rice mill	221	220		1
35	Medium rice mill	160	152		8
36	Large rice mill	57	57		
37	Silo	1	1		
38	APPO	75	70		5

Catatan: B = Baik
KB = Kurang Baik
RB = Rusak Berat

Sedangkan bangunan yang tersedia adalah sebagai berikut:

No	Nama Sarana dan Prasarana	Alamat	Wujud Sarana dan Prasarana
1	Rumah Potong Hewan (RPH) Gondang	Desa Pugeran Kec. Gondang	 Gedung 1 unit
2	Rumah Potong Hewan (RPH) Gedeg	Desa Gedeg Kec. Gedeg	 Gedung 1 unit
3	Rumah Potong Hewan (RPH) Jatirejo	Dusun Jasem Desa Dinoyo Kec. Jatirejo	 Gedung 1 unit

4	Rumah Potong Hewan (RPH) Mojosari	Desa Ngrame Kec. Pungging	 Gedung 1 unit
5	Rumah Potong Hewan (RPH) Sooko	Desa Kedungmaling Kec. Sooko	 Gedung 1 unit
6	Pasar Hewan Ngrame	Desa Ngrame Kec. Pungging	 Gedung 1 unit
7	Pasar Hewan Pandan	Desa Pandan Kec. Pacet	 Gedung 1 unit
8	Gedung BPP Jetis	Desa Mojolebak Kec. Jetis	 Gedung 1 unit
9	Gedung BPP Gedeg	Desa Terusan Kec. Gedeg	 Gedung 1 unit
10	Gedung BPP Trowulan	Desa Jambuwok Kec. Trowulan	 Gedung 1 unit
11	Gedung BPP Sooko	Desa Kedungmaling Kec. Sooko	 Gedung 1 unit
12	Gedung BPP Jatirejo	Desa Sumengko Jatirejo Kec. Jatirejo	 Gedung 1 unit
13	Gedung BPP Bangsal	Desa Sumberwono Kec. Bangsal	 Gedung 1 unit
14	Gedung BPP Mojoanyar	Desa Sadartengah Kec. Mojoanyar	 Gedung 1 unit
15	Gedung BPP Puri	Desa Tangunan Kec. Puri	 Gedung 1 unit
16	Gedung BPP Dlanggu	Desa Tumapel Kec. Dlanggu	 Gedung 1 unit
17	Gedung BPP Gondang	Desa Padi Kec. Gondang	 Gedung 1 unit
18	Gedung BPP Kutorejo	Desa Kutorejo Kec. Kutorejo	 Gedung 1 unit
19	Gedung BPP Pacet	Desa Pacet Kec. Pacet	 Gedung 1 unit

20	Gedung BPP Trawas	Desa Trawas Kec. Trawas	 Gedung 1 unit
21	Gedung BPP Pungging	Ds. Tunggalpager Kec. Pungging	 Gedung 1 unit
22	Gedung BPP Mojosari	Kelurahan Sarirejo Kec. Mojosari	 Gedung 1 unit
23	Gedung BPP Ngoro	Ds. Kembangsri Kec. Ngoro	 Gedung 1 unit
24	Gedung BPP Kemlagi	Ds. Mojokusumo Kec. Kemlagi	 Gedung 1 unit
25	Gedung BPP Dawarblandong	Ds. Pulorejo Kec. Dawarblandong	 Gedung 1 unit
26	Gedung Puskesmas Puri	Ds. Tangunan Kec. Puri	 Gedung 1 unit
27	Gedung Puskesmas Dawarblandong	Ds. Pulorejo Kec. Dawarblandong	 Gedung 1 unit
28	Gedung Puskesmas Gondang	Ds. Gondang Kec. Gondang	 Gedung 1 unit

Lokasi Kantor Dinas Pertanian yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Dinas Pertanian, lokasi yang terpisah dari kompleks kantor Pemerintah Kabupaten member peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus. Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan seperti computer, printer, scanner dll dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai.

Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi asset adalah banyaknya barang yang sudah rusak tetapi belum dilakukan penghapusan, serta tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan dokumen produk Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto

2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2016-2020) bidang pertanian menjadi titik berat pembangunan ekonomi di Kabupaten Mojokerto, hal tersebut didukung oleh potensi pertanian yang dimiliki Kabupaten Mojokerto yang cukup besar dan variatif serta kondisi agroekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas, yaitu tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan dan peternakan.

Masyarakat Kabupaten Mojokerto sebagian besar bermata pencaharian pada bidang pertanian, sehingga pembangunan ekonomi kerakyatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 5 tahun tersebut berfokus pada bidang pertanian. Kontribusi bidang pertanian terhadap PDRB tahun 2020 sebesar 7,96%, sedangkan sub kategori usaha pertanian, peternakan, perburuhan dan jasa pertanian juga memberikan kontribusi yang besar yaitu 93,31% dalam menciptakan nilai tambah lapangan usaha.

Dalam meningkatkan produksi padi dan jagung tahun 2016-2019 masih menunjukkan hasil yang menggembirakan dengan rasio capaian rata-rata 100%. Meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat dari dampak pandemic covid 19, dimana pengaruhnya terhadap distribusi saprodi tetapi masih mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Mojokerto pada umumnya.

Sub sektor pertanian jika dibanding pertumbuhan PDRB Kabupaten Mojokerto menunjukkan proporsi semakin menurun pada tahun 2020.

Gambaran kinerja pelayanan urusan pertanian tanaman pangan dan hortikultura tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

- a. Data Capaian Kinerja Luas Lahan dan Produktivitas Tahun 2016-2020 sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 7
Luas lahan dan produktivitas tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Luas Areal Tanam (Ha)						
1	Padi	65.132	57.558	55.459	44.704	61.333
2	Jagung	26.287	24.830	24.692	23.136	27.648
3	Kedelai	2.378	2.049	1.480	1.140	887
4	Kacang Tanah	965	609	803	559	691
5	Kacang Hijau	2.273	1.331	2.018	1.701	1.936
6	Ubi Kayu	919	317	614	457	526
7	Ubi Jalar	2.408	1.724	2.280	2.147	2.100
8	Bawang Merah	352	331	451	326	406
9	Bawang Putih	6	3	7	10	109
10	Cabe Besar	54	49	33	15	21,4
11	Cabe Kecil	3.015	2.742	3.438	3.007	3.878,30
12	Tomat	70	53	44	58	35,5
Produksi (ton)						
1	Padi	343.883,80	338.432,98	335.944,30	307.469,77	305.874,16
2	Jagung	141.808,30	147.642,25	148.837,03	162.798,13	155.838,81
3	Kedelai	3.003,10	2.424,26	1.575,71	1.602,40	1.263,50
4	Kacang Tanah	1.495,69	725,99	1.093,54	766,54	978,62
5	Kacang Hijau	41,00	16,67	1.755,85	1.448,38	1.637,65
6	Ubi Kayu	16.506,74	17.163,53	7.738,47	12.693,30	8.343,79
7	Ubi Jalar	87.580,52	59.413,89	65.024,60	68.121,63	74.089,60
8	Bawang Merah	3.161	4.965	6.664	4.863	5.453,60
9	Bawang Putih	84	120	98	140	1.125,50
10	Cabe Besar	131	98	95	62	121,9
11	Cabe Kecil	1.114	484	3.374	5.810	5.804,80
12	Tomat	567	557	1.254	3.158	895,3
Produktivitas (kw/ha)						
1	Padi	61,15	60,136	61,652	60,434	60,46
2	Jagung	57,46	60,72	59,57	55,72	63,16
3	Kedelai	13,32	12,48	16,67	14,29	15,04
4	Kacang Tanah	13,84	14,69	15,97	13,98	15,07
5	Kacang Hijau	1,62	1,57	8,96	12,54	10,17
6	Ubi Kayu	217,22	419,05	229,92	215,94	184,11
7	Ubi Jalar	396,12	342,44	360,59	337,96	362,12
8	Bawang Merah	90	150	148	149	136
9	Bawang Putih	140	400	140	140	103,3
10	Cabe Besar	179	143	22	41	63
11	Cabe Kecil	66	56	12	16,9	16,8
12	Tomat	208	269	261	632	205,8

- b. Data Capaian Kinerja Tata Guna Lahan dan Jaringan Tersier Tahun 2016-2020 seperti yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 8
Tata Guna Lahan dan Jaringan Tersier
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tata guna lahan:					
	- Reklamasi Lahan	-	-	-	-	-
	- Optimasi Lahan	-	700 ha	500 ha	100 ha	405 ha
	- Irigasi Air tanah dangkal	-	18 unit	-	-	-
	- Dam Parit	-	3 unit	-	-	-
	- Jalan Usaha Tani	49.9 km	-	11 km	8.6 km	16.5 km
	- Jaringan Irigasi Pertanian (JIP)	35.4 km	-	-	-	-
	- Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	-	4.2 km	-	-	-
	- Jaringan Irigasi Pedesaan (JIDES)	-	3.76 km	-	-	-
2.	PISP					
	- Rehab jaringan tersier	650 ha	3.000 ha	3.100 ha	2.000 ha	3.000 ha
	- SRI	-	-	1.000 ha	600 ha	240 ha
	- Legalisasi pembentukan badan hukum					

- c. Data capaian kinerja bantuan sarana dan prasarana pertanian serta pengelolaan jaringan irigasi tahun 2016 – 2020 Kabupaten Mojokerto sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 9
Bantuan Alsintan Tahun 2016-2020

Perolehan Bantuan Alsintan th 2015 s/d 2020							
Jenis Alat/Mesin	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hand traktor	Unit	n/a	413	88	60	24	35
Traktor roda 4	Unit	n/a	10	19	8	1	5
Pompa Air	Unit	n/a	93	64	37	6	40
Rice Transplanter	Unit	n/a	25	15	8	-	5
Cultivator	Unit	n/a	-	-	2	2	16
Combine Harvester Besar	Unit	n/a	-	-	-	2	-
Combine Harvester Sedang	Unit	n/a	-	2	-	4	-
Combine Harvester Kecil	Unit	n/a	-	6	-	-	-
Corn Seller	Unit	n/a	-	-	-	9	-
Vertical Dryer 10 ton	Unit	n/a	-	-	1	-	-
Vertical Dryer 6 ton	Unit	n/a	-	-	1	-	-
Copper	Unit	n/a	2	-	-	-	-
Pedal Thresher	Unit	n/a					
Corn Planter	Unit	n/a	-	7	-	-	-
Corn Planter Manual	Unit	n/a	-	-	9	-	-
Hand Sprayer	Unit	n/a	-	-	40	10	32
Alat Tanam	Unit	n/a	6	-	-	-	-
Alat Bengkel	Unit	n/a	4	-	-	-	-
Power Thresher	Unit	n/a	67	-	11	12	-
Power Thresher Multiguna	Unit	n/a	-	-	-	6	-
Motor Roda 3	Unit	n/a	-	-	-	-	2
Terpal Plastik	Buah	n/a	-	-	-	-	50
Ember Plastik	Buah	n/a	-	-	-	-	18
Mesin Vacuum Frying	Unit	n/a	-	-	-	-	1
Mesin Pengiris Multiguna	Unit	n/a	-	-	-	-	1
Spinner	Unit	n/a	-	-	-	-	1
Mesin Continuous Sealer	Unit	n/a	-	-	-	-	1
Bangsai Pasca Panen	Unit	n/a	-	-	-	-	1
Keranjang Panen	Buah	n/a	-	-	-	-	50
Sarana Pencucian	Buah	n/a	-	-	-	-	18

- d. Data Capaian Kinerja Luas Tanaman Perkebunan Tahun 2016-2020 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 10
Luas Tanam Perkebunan (Ha)

No	Komoditi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	TANAMAN SEMUSIM					
1	TEBKAU	336	274	249	217	190
2	TEBU	12.396	9.167	9.255	8.922	8.864
3	SERAT KARUNG	-	-			
4	KAPAS	26	15	10	6	1
B	TANAMAN TAHUNAN					
1	KELAPA	53	31	11,5	5	3,5
2	KOPI	108	141	208	217	227
3	CENGKEH	45	45	52	56	56
4	KAPUK RANDU	111	111	93	74	54,5
5	JAMBU MENTE	28	28	27	25	21
6	LAIN-LAIN (Obat-obatan)					

Tabel 11
Luas Panen Perkebunan (Ha)

No	Komoditi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	TANAMAN SEMUSIM					
1	TEBKAU	336	274	249	217	190
2	TEBU	12.396	9.167	9.255	8.922	8.864
3	SERAT KARUNG	-	-			
4	KAPAS	26	15	10	6	1
B	TANAMAN TAHUNAN					
1	KELAPA	53	31	12	5	4
2	KOPI	108	141	208	217	227
3	CENGKEH	45	45	52	56	56
4	KAPUK RANDU	111	111	93	74	55
5	JAMBU MENTE	28	28	27	25	21
6	LAIN-LAIN (Obat-obatan)					

Tabel 12
Produksi Perkebunan (Ton)

No	Komoditi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	TANAMAN SEMUSIM					
1	TEBKAU	3.276	2.376	2.171	2.299	2.048
2	TEBU	70.687	52.485	56.581	42.703	45.065
3	SERAT KARUNG					
4	KAPAS	22	9	2.808	4	-
B	TANAMAN TAHUNAN					
1	KELAPA	59	30	13	4	2
2	KOPI	79	148	148	151	158
3	CENGKEH	22	22	26	28	27
4	KAPUK RANDU	91	91	60	46	36
5	JAMBU MENTE	9	9	22	20	16
6	LAIN-LAIN (Obat-obatan)					

Tabel 13
Produktivitas Perkebunan (Kg/Ha)

No	Komoditi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	TANAMAN SEMUSIM					
1	TEBKAU	9.667	9.691	9.868	10.250	10.652
2	TEBU	5.335	5.535	5.626	159.284	4.812
3	SERAT KARUNG					
4	KAPAS	846	608	281	1	-
B	TANAMAN TAHUNAN					
1	KELAPA	1.153	952	696	620	675
2	KOPI	735	952	712	696	698
3	CENGKEH	506	506	529	494	1.144
4	KAPUK RANDU	640	11.513	647	623	653
5	JAMBU MENTE	354	354	804	780	738
6	LAIN-LAIN (Obat-obatan)					

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah produksi pangan utama (ton)																		
	- Padi				293.922,74	298.449,15	302.955,73	307.469,77	311.989,58	343.883,80	338.432,98	335.944,30	307.469,77	305.874,16	117,00%	113,40%	110,89%	100,00%	98,04%
	- Jagung				150.894,43	154.862,95	158.827,44	162.798,13	166.770,40	141.808,30	147.642,25	148.837,03	162.798,13	155.838,81	93,98%	95,34%	93,71%	100,00%	93,45%
	- Kedelai				1.068,30	1.246,38	1.424,36	1.602,40	1.780,43	3.003,10	2.424,26	1.575,71	1.602,40	1.263,50	281,11%	194,50%	110,63%	100,00%	70,97%
2	Jumlah hasil produksi tanaman hortikultura (ton)																		

	- Bawang Merah				44.335,05	45.767,07	47.195,00	48.625,00	50.054,58	3.161	4.965	6.664	4.863	5.453,60	7,13%	10,85%	14,12%	10,00%	10,90%
	- Cabai rawit				55.256,10	59.201,38	63.150,11	67.097,00	71.042,30	1.114,00	484,00	3.374,00	5.810,00	5.804,80	2,02%	0,82%	5,34%	8,66%	8,17%
3	Jumlah produksi tanaman perkebunan (ton)																		
	- Tebu				40.082,26	40.883,90	41.783,35	42.786,15	43.898,59	12.395,60	9.166,84	9.255,28	8.921,51	8.864,00	30,93%	22,42%	22,15%	20,85%	20,19%
	- Tembakau				2.174,87	2.211,86	2.256,10	2.305,73	2.363,37	3.276,00	2.375,80	2.170,77	2.299,20	2.048,00	150,63%	107,41%	96,22%	99,72%	86,66%
	- Kopi				135,92	140,41	145,47	151,29	157,80	79,00	148,00	148,00	151,00	158,40	58,12%	105,41%	101,74%	99,81%	100,38%
	- Cengkeh				25,49	26,18	26,94	27,75	28,67	21,60	21,60	26,10	27,70	26,70	84,74%	82,51%	96,88%	99,82%	93,13%
	- Kakao				87,37	90,69	94,32	98,28	102,61	94,70	95,83	9.575,00	98,00	98,20	108,39%	105,67%	10151,61%	99,72%	95,70%
4	Jumlah produksi hasil ternak (ton)																		
	- Daging				10.651,46	12.781,75	15.082,46	17.344,83	20.120,00	2.359,14	10.901,44	14.622,36	17.469,95	18.141,45	22,15%	85,29%	96,95%	100,72%	90,17%

	- Telur				7.849,18	8.643,10	9.324,83	9.977,57	10.676,00	6.235,72	7.539,45	7.201,13	9.923,76	12.001,18	79,44%	87,23%	77,23%	99,46%	112,41%
	- Susu				3.987,23	4.106,85	4.180,77	4.285,29	4.371,00	4.485,40	6.248,94	4.240,75	4.279,80	4.485,40	112,49%	152,16%	101,43%	99,87%	102,62%

Berdasarkan tabel TC-23. diatas, untuk masing – masing indikator kinerja Dinas Pertanian dapat dijelaskan sebagaiberikut :

1. Produksi tanaman pangan dan hortikultura berupa padi, jagung, dan kedelai

Produksi tanaman pangan utama berupa padi, jagung, sebagaimana pada indikator no. 1 (satu) diperoleh gambaran bahwa dari produksi 3 (tiga) jenis tanaman pangan tersebut rata – rata menghasilkan capaian kinerja yang cukup baik meski tidak memenuhi target yang telah ditentukan.

2. Produktivitas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Berupa Padi, Jagung dan Kedelai

Dari hasil evaluasi terhadap indikator sasaran produktivitas tanaman pangan utama berupa padi, jagung, dan kedelai tersebut rata – rata menghasilkan capaian kinerja yang cukup baik walaupun mengalami fluktuasi turun naik, tetapi secara keseluruhan sudah cukup baik. Hal ini disebabkan adanya beberapa kegiatan yang mendorong terjadinya peningkatan produktivitas antara lain kegiatan Peningkatan Produksi Padi Melalui Sistem Tanam Jajar Legowo), penerapan teknologi tepat guna, perbaikan sarana prasarana pengairan berupa pembangunan/pemeliharaan Jaringan Irigasi Perpipaan, pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal, pembangunan Dam Parit, penggunaan benih unggul dan pupuk berimbang sekaligus pupuk organik.

3. Produksi Hasil Peternakan

Produksi hasil ternak sebagaimana indikator no. 4 pada tabel diatas merupakan indikator utama, dimana untuk mencapai kinerja produksi hasil ternak dari tahun ke tahun menunjukkan hasil meningkat meskipun masih dibawah.

Upaya untuk mendorong peningkatan populasi sapi potong 3% per tahun, antara lain dengan kebijakan optimalisasi kelahiran ternak hasil inseminasi buatan, pengendalian pemotongan ruminasia betina produktif, dan kesehatan hewan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari peternakan diperoleh dari retribusi dan lain-lain pendapatan Daerah lain yang sah. Target PAD mengalami peningkatan berkisar 20 % pertahun , sedangkan realisasi selalu melampaui target, dengan peningkatan berkisar 15 % pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa potensi PAD masih dapat ditingkatkan dengan cara memperbesar kapasitas sarana dan prasana dan cakupan pelayanan kepada masyarakat.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto

Dari hasil analisis terhadap Renstra Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, khususnya menyangkut keselarasan dengan tujuan dan sasaran yakni meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri pengolahan. Hasil analisis terhadap Renstra Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 menyangkut keselarasan dengan tujuan dan sasaran yakni, sedangkan hasil analisis terhadap Renstra Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 menyangkut keselarasan dengan tujuan dan sasaran yakni meningkatkan produksi peternakan melalui peningkatan populasi dan produktivitas ternak, status kesehatan hewan serta keamanan produk yang dihasilkan.

Sebagaimana hasil telaahan terhadap RTRW, sinkronisasi dan keselarasan dokumen Renstra Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan dengan RTRW telah dilakukan untuk menjamin kepastian dalam aspek spasial (keruangan), sektoral, tata guna lahan, serta aspek lain yang terkait. dan hasil analisis terhadap

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto. Hasil telaah atas dokumen-dokumen tersebut yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Dalam konteks sub bab ini dikemukakan macampelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Sesuai dengan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto yakni

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan,
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara sistematis, hasil kajian/telaah atas peluang dan tantangandalam 5 tahun kedepan yang dihadapi berkaitan dengan fungsi Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan dituangkan sebagai berikut:

a. Peluang (*Opportunities*)

yaitu situasi dan faktor-faktor luar bersifat positif yang menjadi daya dorong Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, meliputi:

1. Tingginya kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap komoditi pertanian, perkebunan dan peternakan sehingga terbuka kesempatan bagi petani untuk mengembangkan budidaya dan produksi komoditi yang mempunyai nilai ekonomis dan daya jual yang tinggi.
2. Meningkatnya Perkembangan dan kemajuan teknologi pertanian, perkebunan dan peternakan dari proses produksi di hulu hingga pengolahan di hilir.

3. Berkembangnya pola kemitraan dalam usaha agribisnis antara petani/keompok tani dengan pengusaha/ produsen;

b. Tantangan (*Threats*)

adalah unsur pada lingkungan eksternal yang tantangan bagi pencapaian tujuan

1. Menurunnya daya dukung sumber daya alam akibat anomali iklim dan, degradasi lahan
2. Semakin ketatnya Persaingan pasar global
3. Alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian(pemukiman dan industri)
4. Berkurangnya minat tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan (Kelangkaan SDM)
5. Fluktuasi harga komoditi pertanian perkebunan dan peternakan
6. Adanya ketidak pastian kondisi iklim akibat adanya pemanasan suhu bumi (global warning)
7. Adanya ancaman oleh serangan OPT
8. Masih rendahnya peran dan fungsi kelembagaan tani dalam pembangunan pertanian

SOLUSI

Upaya konkrit yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah:

1. Kebijakan yang diambil dalam rangka mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. Mengembangkan model pertanian dengan pemilihan komoditas pertanian yang memiliki produktivitas tinggi, memiliki nilai ekonomi tinggi dan mempunyai peluang pasar yang terbuka serta dapat dikembangkan pada lahan sempit,

sehingga diharapkan keterbatasan lahan bukan menjadi kendala untuk usaha di bidang pertanian.

3. Untuk meningkatkan nilai tambah, usaha pertanian lainnya yang dikembangkan adalah pengolahan hasil pertanian.
4. Pemanfaatan agensi hayati untuk menanggulangi serangan OPT sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga
5. Mengoptimalkan kelembagaan pertanian dalam peran sertanya pada pembangunan pertanian
6. Meningkatkan kinerja aparat pertanian baik di lapangan maupun di kantor melalui pembinaan, pelatihan dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu-isu strategis terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dirumuskan berdasarkan kajian analisis SWOT lingkungan dinas, yang terdiri atas lingkungan internal dan eksternal. Berdasarkan analisis SWOT dari lingkungan organisasi, maka dirumuskan isu-isu strategis organisasi dan kunci keberhasilan pembangunan bidang pertanian di Kabupaten Mojokerto.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian

a. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

1. Terbatasnya sumberdaya lahan pertanian di Kabupaten Mojokerto
2. Terjadinya kecenderungan penurunan luas lahan pertanian
3. Terjadi kecenderungan peningkatan luas lahan terbangun dan industri
4. Belum optimalnya infrastruktur pertanian
5. Tingkat kehilangan hasil masih cukup tinggi dan masih rendahnya daya saing produk pertanian terhadap produk impor.
6. Masih tingginya penggunaan pestisida dan pupuk anorganik
7. Adanya dampak perubahan iklim terhadap tingginya OPT
8. Perdagangan bebas regional yang memperlemah posisi petani sebagai produsen
9. Semakin menurunnya tenaga kerja pertanian

b. Bidang Perkebunan

1. Produktivitas dan mutu yang masih rendah
2. Makin terbatas lahan yang subur untuk budidaya tanaman perkebunan
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perkebunan
4. Tingginya serangan OPT
5. Rendahnya kemampuan kelembagaan petani dalam akses teknologi informasi, permodalan dan kemitraan

c. Bidang Peternakan

1. Usaha peternakan masih didominasi peternak kecil yang mempunyai lahan yang sempit, modal kecil dan produktivitasnya rendah
2. Kelembagaan petani dan sumber daya manusia yang belum tangguh dan mandiri
3. Kurangnya betina produktif, inbreeding dan belum luasnya capaian hasil program Inseminasi Buatan
4. Masih banyak terjadinya penyebaran penyakit ternak tahunan (endemik) dan zoonosis
5. Pengelolaan reproduksi belum dikelola dengan baik
6. Peternak belum memiliki orientasi bisnis

d. Bidang Penyuluhan

1. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya
2. Belum optimalnya kegiatan penyuluhan
3. Belum optimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi penyuluhan
4. Terbatasnya jumlah penyuluh pertanian
5. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM
6. Kurangnya monitoring dan evaluasi personal

Tabel 15.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Pertanian

Aspek Kajian	Capaian/Kon disi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
Pelayan an Dinas Pertani an	Fluktuasi produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura	- Renstra Dinas Pertanian - SOP Budidaya - SOP Penangana n Pasca Panen dan Pemasaran Hasil	- Perumusan kebijakan teknis pertanian - Pembinaan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan yang baik dan benar	- Inovasi teknologi pertanian - Akses modal bagi petani - Perubahan cuaca dan iklim - Persaingan pasar bebas	- Tingkat kehilangan hasil yang cukup tinggi - Rendahnya daya saing produk pertanian terhadap produk impor - Kemampuan petani terhadap akses teknologi informasi dan pasar masih rendah
	Menurunnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan (tebu)	Renstra Dinas Pertanian	- Perumusan kebijakan teknis pertanian - Pembinaan penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan (tebu) yang baik dan benar	- Inovasi dan teknologi perkebunan - Akses modal petani - Harga pasar gula menurun	- Rendahnya daya saing produk perkebunan terhadap impor - Masih rendahnya kemampuan kelembagaan petani dalam akses teknologi, modal dan kemitraan
	Angka prevalensi penyakit PHMS masih cukup tinggi	SOP pengendalian penyakit Brucellosis Kementan	-	- Rendahnya kesadaran peternak akan arti pentingnya penyakit brocellosis - Masih adanya lalu lintas ternak antar	- Kurangnya SDM Teknis (Medis dan paramedis veteriner)

				kabupaten dan provinsi. Yang ilegal	
	Nilai titer antibody penyakit PHMS penyakit flu burung masih rendah pada unggas	SOP pengendalian penyakit Brucellosis Kementan	- Penyediaan vaksin flu burung yang masih belum sesuai dengan ternak rentan - Rendahnya biaya kompensasi terhadap pemusnahan unggas yang positif flu burung	- Masih ada lalu lintas ternak antar kabupaten. Dan provinsi yang ilegal	- Kurangnya SDM teknis (medis dan paramedis veteriner - Kurangnya fasilitas laboratorium untuk melakukan diagnosis secara tepat dan cepat
	Prosentase residu antibiotika pada bahan asal hewan masih tinggi	SNI O1-6366-2000	- Dukungan anggaran sangat terbatas untuk meningkatnya jumlah sampel yang representatif	-	
	Lab. Kesmavet masih belum terakreditasi	UU No. 18/2009, PP Permentan No.95/2012	- Kurangnya sarana dan prasarana untuk menuju proses akreditasi lab kesmavet	-	- Kompetensi SDM yang terbatas
	Pencapaian produksi peternakan dan populasi ternak	Sasaran produksi dan populasi	- Keterbatasan SDM dan sarana prasarana dalam peningkatan produksi dan populasi ternak - Keterbatasan anggaran	- Inovasi dan teknologi peternakan - Aksesibilitas permodalan bagi peternak	- Kurangnya ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan - Sistem perbenihan dan pembibitan belum berjalan optimal - Keterbatasan akses permodalan - Lemahnya kapasitas dan

					kelembagaan peternak - Kurangnya optimalisasi kinerja dan pelayanan birokrasi peternakan - Rendahnya produktivitas ternak - Keterbatasan SDM peternakan dan kesehatan hewan
Kajian renstra Kementerian/Lembaga	Pencapaian produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih dibawah target	Sasaran produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	- Perumusan kebijakan teknis pertanian dan perkebunan - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan - Pembinaan penanganan panen dan pasca panen serta pengolahan hasil secara teknis	- Inovasi dan teknologi - Akses modal bagi petani - Perubahan iklim	- Kurang tersedianya benih/bibit unggul bermutu, alat dan mesin pertanian - Kurangnya ketersediaan infrastruktur - Kelembagaan yang belum mandiri
	Pencapaian produksi peternakan dan populasi ternak masih di bawah target	Sasaran produksi dan populasi	- Keterbatasan potensi sumberdaya manusia dan sarana prasarana dalam peningkatan produksi dan populasi ternak - Keterbatasan anggaran	- Inovasi dan teknologi peternakan - Aksesibilitas permodalan bagi peternak - Membanjirnya produk impor	- Kurangnya ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan - Sistem perbenihan dan pembibitan belum berjalan optimal - Keterbatasan akses permodalan - Lemahnya kapasitas dan kelembagaan peternak

					- Kurangnya optimalisasi kinerja dan pelayanan birokrasi peternakan - Rendahnya produktivitas ternak - Keterbatasan SDM peternakan dan kesehatan hewan
Kajian Renstra SKPD Provinsi	Pencapaian produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dan peternakan masih dibawah target	Sasaran produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dan peternakan	- Perumusan kebijakan teknis pertanian dan perkebunan dan peternakan - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan - Pembinaan penanganan panen dan pasca panen serta pengolahan hasil secara teknis	- Inovasi dan teknologi - Akses modal bagi petani - Dampak perubahan iklim	- Kurang tersedianya benih/bibit unggul bermutu, alat dan mesin pertanian - Kurangnya ketersediaan infrastruktur - Kelembagaan yang belum mandiri
	Pencapaian produksi peternakan dan populasi ternak masih di bawah target	Sasaran produksi dan populasi	- Keterbatasan potensi sumberdaya manusia dan sarana prasarana dalam peningkatan produksi dan populasi ternak - Keterbatasan anggaran	- Inovasi dan teknologi peternakan - Aksesibilitas permodalan bagi peternak - Membanjirnya produk impor	- Kurangnya ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan - Sistem perbenihan dan pembibitan belum berjalan optimal - Keterbatasan akses permodalan - Lemahnya kapasitas dan kelembagaan peternak

					- Kurangnya optimalisasi kinerja dan pelayanan birokrasi perternakan
Kajian RT/RW	- Makin sempitnya rata-rata kepemilikan lahan petani	- UU No 41 Th 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan - Perda Provinsi Jatim Nomor 5 Th 2012 tentang Rt/RW Jatim 2011-2031 - Perda Kab. Mojokerto Nomor 9 Th 2012 tentang RT/RW Kab. Mojokerto 2012.-2032	- Optimasi Lahan - Pengembangan Kawasan Pertanian - Pengembangan Infrastruktur - Pengembangan pupuk organik dan alsintan	- Komitmen Kab. Mojokerto terhadap LP2B	- Tingginya alih fungsi lahan menjadi pemukiman dan industri - Pemanfaatan alsintan yang belum optimal
	- Karakter masyarakat petani yang masih tradisonal (individual farming) - Luas lahan rata-rata <0,25 ha dan pendapatan peternak rendah - Masih tingginya angka kemiskinan peternak - Rendahnya penguasaan teknologi pengolahan dan hasil pemasaran perdesaan		- potensi	- RTRW Kabupaten	- Pengembangan kawasan peternakan yang mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak - Mempertahankan sumberdaya genetik sebagai potensi daerah - Pengembangan kawasan peternakan diarahkan kepada pengembangan komoditas ternak unggulan daerah dengan keunggulan

	- Rendahnya kualitas hasil produk peternakan sehingga daya saing rendah - Kepemilikan ternak yang belum memenuhi standar usaha (hanya 1-2 ekor/peternak sedangkan standarnya 4-5 ekor/peternak) - Belum optimalnya penggunaan sumberdaya alam dan SDM yang mendukung agribisnis peternakan				koparatif dan kompetitif - Peningkatan populasi ternak melalui peningkatan mutu genetik - Mengoptimalkan fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk pelayanan dan perlindungan masyarakat - Meningkatkan kualitas kesehatan hewan dan produk pangan asal hewan melalui tindak pengamanan ternak sesuai dengan prosedur pengamanan penyakit hewan menular - Peningkatan pengendalian pemotongan hewan betina produktif
Kajian KLHS	- Kegiatan pertanian berkontribusi terhadap emisi rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global dan kerusakan tanah	- Undang-undang Nomor 32 Th 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Pergub Jatim Nomor 67 Th 2012 tentang RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Prov Jatim	- Penggunaan pupuk organik dan pestisida hayati belum optimal	- Perubahan pola tanam terhadap serangan OPT	- Menurunnya daya dukung sumber daya alam akibat anomali iklim dan degradasi lahan

	- Kebanyakan peternak telah menerapkan eco-farming, yaitu, pengolahan limbah ternak menjadi bahan yang bermanfaat seperti untuk pupuk dan biogas - Masih ada pemeliharaan ternak yang dekat dengan pemukiman penduduk sehingga menimbulkan polusi dan bau - Penyebaran penyakit hewan menular kepada manusia - Seiring dengan meningkatnya populasi ternak mengakibatkan peningkatan emisi gas yang berasal dari kotoran ternak dan proses pencemaran, terutama yang berasal dari hewan ternak besar	Permendagri Nomor 67 tahun 2012	- Pembinaan good farming partice perlu diintensifkan	- Minat Peternak	- Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis - Manegemen pakan dan pengolahan limbah - Penetapan kawasan peternakan sesuai dengan potensi wilayah
--	---	---------------------------------	--	------------------	---

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Mojokerto yang tercantu dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, yaitu:

Visi : ***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”***

Penjabaran Visi tersebut adalah sebagai berikut:

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil, dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. •

- **Terwujud** dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- **MAJU** dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto yang lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental - spiritual, dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi.
- **ADIL** dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto melaksanakan pembangunan secara merata sehingga terwujud pemerataan hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok sosial, antar desa maupun antar sector
- **MAKMUR** dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak, terjadi peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil pedesaan lainnya, menurunnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

Misi

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka kami jabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan.
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, social, budaya dan pelestarian lingkungan.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Pertanian dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadi Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Pertanian harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Pertanian yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Dinas Pertanian berkontribusi untuk mewujudkan sebagian Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

Misi Ke-2 : *Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan*, dengan sasaran:

1. Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan daerah (indikator: PDRB) ,
2. Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan agrobisnis dan agro industri

dengan strategi yang digunakan adalah:

Upaya pengembangan hasil pertanian yang terintegrasi mulai dari hulu ke hilir, serta mulai dari produksi, distribusi dan pemasaran dengan mengutamakan keberpihakan kepada petani dan masyarakat pengguna hasil pertanian:

Salah satu Kebijakan Umum yang diambil dari arah kebijakan pembangunan adalah Kebijakan membangun sistem ekonomi kerakyatan yang mampu menggerakkan sendi-sendi perekonomian berbasis potensi daerah yang unggul, kokoh dan stabil.

Terhadap kebijakan ini maka urusan Pemerintah Daerah (beserta program terpilih) yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Untuk Urusan Pertanian:

Dari tujuan OPD yang pertama yaitu:

Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal menuju perekonomian daerah dengan indikator tujuan: Meningkatkan PDRB Sektor Pertanian dan

Sasaran OPD yaitu Meningkatkan produksi pertanian (Tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan) dengan indikator sasaran: Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Beberapa program untuk mendukung sasaran ini adalah:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini dititikberatkan untuk produktivitas dan produksi pertanian/perkebunan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian pangan daerah.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain:

- a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kab/Kota
 - c. Peningkatan Mutu dan Peredaran benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kab/Kota
 - d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer
 - e. Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak dalam daerah kab/kota
 - f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah kab/kota lain.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program ini diarahkan pada fasilitasi penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain:
- a. Pengembangan prasarana pertanian
 - b. Pembangunan prasarana pertanian
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Program ini lebih diarahkan untuk peningkatan kualitas hasil produksi ternak dengan , kegiatan pokok yang dilakukan adalah:
- a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kab/kota

- b. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kab/kota
 - c. Pengelolaan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kab/kota
 - d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner
 - e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan hewan
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
- Program ini diarahkan untuk mengantisipasi terjadinya bencana pertanian yang disebabkan oleh perubahan iklim dan cuaca, serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), dan lain sebagainya, dengan kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah:
- Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kab/Kota

Untuk tujuan OPD yang kedua, yaitu:

Meningkatkan Kesejahteraan Petani melalui Pengembangan Agrobisnis dan Agro industri, dengan indikator tujuan: Nilai Tukar Petani

Sasaran OPD dari tujuan kedua ini adalah:

Meningkatnya Kesejahteraan Petani, dengan indikator Nilai Tukar Petani, beberapa program yang mendukung untuk tercapainya kinerja OPD adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Program ini merupakan program kegiatan rutin untuk operasional dinas dan indikator kinerja: Nilai SAKIP Perangkat Daerah, meliputi beberapa kegiatan diantaranya adalah:

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini diperuntukkan memberikan rekomendasi ijin usaha yang terfasilitasi, meliputi kegiatan yang dilaksanakan:

- Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kab/Kota.

3. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan untuk mewujudkan petani yang mandiri, berwawasan agribisnis serta mampu mengelola sumberdaya secara efisien dan berkelanjutan, meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan dan wawasan Penyuluh Pertanian Lapangan sehingga kinerja di lapangan dalam pembinaan terhadap kelompok tani semakin baik. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain:

- Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Tabel 16

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

VISI : *Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Misi, 2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan	-		
1	Program penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	- Kompetensi aparatur dinas belum sepenuhnya merata - Keterbatasan sarana dan prasarana dinas	- Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi informasi, pasar - Belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk dan pestisida - Masih rendahnya daya saing produk pertanian/perkebunan terhadap produk impor - Sumberdaya manusia dan kelembagaan belum tangguh - Tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian (pemukiman dan industri) - Belum optimalnya pemanfaatan alsintan - Belum optimalnya infrastruktur pertanian	- Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian - Pesatnya perkembangan teknologi pertanian dari proses produksi di hulu hingga pengolahan di hilir
2	Program Penyediaan pengembangan Prasarana Pertanian			
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan	- Keterbatasan sarana dan prasarana	- Kurangnya SDM Teknis peternakan dan kesehatan hewan	- Dukungan pemerintah pusat melalui APBN

Kesehatan Masyarakat Veteriner	peternakan dan kesehatan hewan - Produksi dan produktivitas ternak yang masih dibawah kinerja yang diharapkan - Wilayah perbibitan, budidaya - Pembrantasan penyakit hewan ternak masih belum tertangani dengan baik terutama penyakit-penyakit yang bersifat seporadis dan belum mampu dibebaskan seperti flu burung dan brucellosis pada sapi perah	- Kurangnya sarana dan prasarana - Kurang tenaga medis veteriner dan paramedis veteriner - Kurangnya sarana dan prasarana lembaga kesehatan hewan PUSKESWAN - Keterbatasan akses permodalan bagi peternak - Kurangnya betina produktif dan belum luasnya capaian hasil program inseminasi buatan - Kelembagaan dan SDM yang masih belum tangguh dan mandiri	- Ternak Sapi potong, sapi perah dan itik - Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam peningkatan produksi peternakan
	- Data dan informasi di tingkat kelompok masih lemah - Minimnya pemanfaatan teknologi	- Akses produk impor peternakan mengancam peternak lokal sehingga dapat menurunkan minat pada subsektor peternakan	- Diversifikasi produk pasca panen telah banyak dilakukan - Teknologi pasca panen

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Pertanian

- a. Kebijakan Pembangunan Pertanian Tahun 2019-2024
 1. Kebijakan peningkatan ketahanan pangan (padi, jagung, kedelai, tebu, sapi, cabai, dan bawang merah) yang berdampak bagi perekonomian
 2. Kebijakan pengembangan komoditi ekspor dan substitusi impor serta komoditas penyedia bahan baku bio-energi

3. Kebijakan peningkatan daya saing produk pertanian melalui standarisasi produk dan proses peningkatan pasok, mutu dan tanaman pangan
4. Kebijakan pengembangan infrastruktur (lahan, air, sarana dan prasarana) dan agro industry di pedesaan, sebagai dasar/landasan pengembangan bio-industri berkelanjutan
5. Kebijakan re-orientasi memproduksi dan satu jenis produk menjadi multi produk (produk utama, bio-energi, produk sampingan, produk dari limbah, zero waste dan lainnya)
6. Kebijakan pengembangan klaster/kawasan, yaitu pada kawasan tertentu yang menyangkut pencapaian target nasional
7. Kebijakan system perbenihan/pembibitan, perlindungan petani, kelembagaan petani, inovasi dan diseminasi teknologi
8. Kebijakan mendukung program tematik, MP3EI, MP3KI, PUG, KSS, Ketenagakerjaan, percepatan daerah tertinggal, kawasan khusus dan wilayah perbatasan
9. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta penanganan paca bencana alam
10. Kebijakan Subsidi :
 - 1) Subsidi pupuk tetap diperlukan dengan cara mengurangi pupuk tunggal, menaikkan subsidi pupuk majemuk
 - 2) Pupuk organik tetap dikembangkan bukan dengan dukungan subsidi, tetapi dialihkan menjadi kegiatan
 - 3) Subsidi benih ditiadakan dan dialihkan menjadi kegiatan penguatan penangkar benih/bibit

11. Kebijakan kredit

- 1) Kredit ketahanan pangan akan terus dilanjutkan untuk mendorong dengan meningkatkan produksi dan produktifitas pangan guna mendukung ketahanan pangan
- 2) Untuk lebih menjamin teralokasinya kredit untuk pangan, maka plafon kredit dialokasikan menurut subsector
- 3) Untuk memecahkan kelangkaan tenaga kerja dan menjamin pengelolaan pangan skala luas, maka kredit mekanisasi pertanian sangat diperlukan
- 4) Kegiatan sertifikasi tanah diperlukan, sehingga layak kredit

b. Strategi Pembangunan Pertanian

1. Menjadikan basis produksi komoditas pangan, komoditas ekspor, penyedia bahan baku industri dan bio-energi dengan pendekatan kawasan
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk pertanian
3. Menyediakan prasarana dasar bidang pertanian
4. Memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

c. Permasalahan Pembangunan Pertanian

1. Lahan

Konversi lahan yang tidak terkendali, keterbatasan dalam pencetakan lahan baru, penurunan kualitas, rata-rata kepemilikan lahan yang sempit, dan ketidakpastian status kepemilikan lahan

2. Infrastruktur

Kerusakan jaringan irigasi yang tinggi, pendangkalan waduk, dan kurang memadainya sarana pelabuhan dan transportasi ternak

3. Benih

Sistem pengadaan benih yang tidak sesuai dengan musim tanam dan belum terbangunnya sistem pembibitan sapi nasional

4. Regulasi/Kelembagaan

Perijinan investasi untuk pengembangan integrasi sawit-sapi, perijinan HGU investasi tanaman pangan yang belum diatur petunjuk pelaksanaannya kecuali untuk tebu, kelembagaan petani yang belum mempunyai posisi tawar yang kuat

5. SDM

Kemampuan petani, peternak dan pekebun dalam memanfaatkan teknologi maju, menurunnya minat generasi muda untuk terjun dibidang pertanian, Keterbatasan tenaga penyuluh, pengamat OPT, Pengawas Benih Tanaman serta tenaga kesehatan hewan

6. Permodalan

Sulitnya akses petani terhadap permodalan, tunggakan kredit usaha tani yang belum terselesaikan, persyaratan agunan kredit KKPE berupa sertifikat, menghambat penyaluran

d. Tantangan Pembangunan Pertanian

1. Perubahan iklim
 - Gagal panen yang berakibat kelangkaan/krisis pangan
2. Kondisi Perekonomian Global
 - i. Terjadi pelemahan nilai tukar rupiah, harga produk dan biaya produksi menjadi lebih mahal
 - ii. Krisis ekonomi berdampak pada perkembangan ekspor
3. Gejolak Harga Pangan Global
 - Harga pangan yang berfluktuasi akibat perubahan iklim sehingga harga pangan menjadi mahal
4. Bencana Alam
 - Kemampuan dan ketersediaan pangan sering terganggu
5. Peningkatan Jumlah Penduduk
 - Melebihi kapasitas lahan yang tersedia
6. Aspek distribusi
 - Mengingat Indonesia sebagai Negara kepulauan diperlukan aksesibilitas dan sarana transportasi yang lebih efisien
7. Laju Urbanisasi yang tinggi, sehingga generasi muda cenderung meninggalkan perdesaan/pertanian. Sektor pertanian menjadi kurang diminati generasi penerus.

Tabel. 17

**Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto
Berdasarkan Renstra Kementerian Pertanian**

No	Sasaran Jangka Menengah K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	a. Pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula	a. Kurangnya optimalisasi kinerja dan pelayanan b. Keterbatasan SDM	- Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi informasi, pasar - Belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk dan pestisida - Masih rendahnya daya saing produk pertanian/perkebunan terhadap produk impor - Sumberdaya manusia dan kelembagaan belum tangguh - Tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian (pemukiman dan industri) - Belum optimalnya pemanfaatan alsintan - Belum optimalnya infrastruktur pertanian	- Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian - Pesatnya perkembangan teknologi pertanian dari proses produksi di hulu hingga pengolahan di hilir
	b. Peningkatan diversifikasi pangan			
	c. Peningkatan komoditas bernilai tambah, daya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor			
	d. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergy			

	e. Peningkatan pendapatan keluarga petani			
	f. Akutabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik			

Tabel. 18

Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto
Berdasarkan Renstra Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Dinas
Pernakan Provinsi Jawa Timur

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Dinas Pertanian Provinsi Jatim 1. Mempertahankan swasembada Padi dan Jagung secara berkelanjutan dan mewujudkan swasembada kedelai dan tanaman pangan utama lainnya 2. Perluasan areal tanam padi serta optimalisasi pemanfaatan lahan dan air melalui JITUT/JIDES 3. Pengamanan produksi tanaman pangan dan hortikultura 4. Penangan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura 5. Peningkatan mutu produk tanaman pangan dan hortikultura	➤ Kompetensi aparatur dinas belum sepenuhnya merata ➤ Keterbatasan sarana dan prasarana	- Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi informasi, pasar - Belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk dan pestisida - Masih rendahnya daya saing produk pertanian/perkebunan terhadap produk impor - Sumberdaya manusia dan kelembagaan belum tangguh - Tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian (pemukiman dan industri) - Belum optimalnya pemanfaatan alsintan - Belum optimalnya infrastruktur pertanian	- Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian - Pesatnya perkembangan teknologi pertanian dari proses produksi di hulu hingga pengolahan di hilir
2				

2	berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan 6. Peningkatan sumber mutu produk 7. Peningkatan kualitas SDM petani, kelembagaan petani untuk meningkatkan akses petani terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan	• Kompetensi aparatur dinas belum sepenuhnya merata • Keterbatasan sarana dan prasarana	- Masih rendahnya daya saing produk pertanian/ perkebunan terhadap produk impor - Tingkat kehilangan hasil masih cukup tinggi - Rendahnya kemampuan kelembagaan petani dalam akses teknologi informasi, permodalan dan kemitraan	- Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian - Pesatnya perkembangan teknologi pertanian dari proses produksi di hulu hingga pengolahan di hilir
3	Dinas Perkebunan Provinsi Jatim 1. Meningkatkan intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi tanaman perkebunan 2. Mengoptimalkan pengembangan perkebunan di lahan marginal 3. Mempertahankan existing lahan history perkebunan 4. Meningkatkan sarana dan prasarana budidaya 5. Mengoptimalkan pengendalian hama penyakit dan gangguan usaha perkebunan 6. Meningkatkan pengawasan pemakaian dan peredaran benih perkebunan 7. Meningkatkan ketersediaan benih perkebunan unggul dan bermutu 8. Meningkatkan sarana prasarana pasca panen dan	• Kompetensi aparatur dinas belum sepenuhnya merata • Keterbatasan sarana dan prasarana peternakan		

	pengolahan hasil perkebunan 9. Meningkatkan kapasitas SDM dalam proses pasca panen Perkebunan 10. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan petani perkebunan secara berkelanjutan 11. Meningkatkan Sekolah Lapang Perkebunan 12. Meningkatkan fasilitasi kelembagaan petani perkebunan. Dinas Peternakan Provinsi Jatim 1. Ekstensifikasi (mengembangkan) dan intensifikasi (meningkatkan) kualitas peternakan dan kesehatan hewan meliputi komoditas, SDM, serta sarana dan prasarana 2. Peningkatan kualitas pengolahan hasil peternakan 3. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan peternak secara berkelanjutan dan terpadu		- Keterbatasan akses modal peternak - Kurangnya betina produktif dan belum luasnya capaian hasil program inseminasi buatan - Masih banyaknya pemotongan ilegal - SDM peternak dan kelembagaan belum tangguh dan mandiri	- Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian - Pesatnya perkembangan teknologi pertanian dari proses produksi di hulu hingga pengolahan di hilir
--	---	--	--	---

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto

Dari hasil telaahan capaian kinerja Renstra tahun lalu, beberapa hal yang mempengaruhi pelayanan adalah:

a. Kekuatan

1. Potensi Lahan, Jumlah penduduk dan Iklim

Kesesuaian dan ketersediaan lahan yang subur, ladang yang luas, jumlah penduduk dan letak strategis memang sangat cocok untuk mengemban tugas pertanian. Lahan yang subur dan tenaga kerja yang banyak merupakan sumber utama keunggulan komparatif untuk pengembangan usaha pertanian, khususnya tanaman pangan yang memang bersifat padat lahan dan padat tenaga kerja.

Usaha pertanian merupakan basis awal dari perkembangan ekonomi di Kabupaten Mojokerto, di samping itu tenaga kerja juga merupakan keunggulan komparatif untuk usaha industri berteknologi rendah biasanya merupakan ciri-ciri dari industri pioneer.

Dengan curah hujan yang cukup tinggi memungkinkan berkembangnya berbagai komoditi tanaman pangan dan hortikultura yang cocok dan telah ada selama ini. Agroklimat di wilayah Kabupaten Mojokerto mendukung tersedianya sumberdaya lahan dataran tinggi dan dataran rendah, ini merupakan salah satu kekuatan untuk mengembangkan keragaman komoditas unggulan berdasarkan zone agroekosistem dan pendekatan komoditi.

Di lain pihak juga adanya perwilayahan komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, hal ini akan memudahkan pengembangan prioritas terhadap komoditas-komoditas pertanian unggulan daerah.

2. Tersedianya Dana dan Prasarana Operasional

Sebagai Lembaga Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugasnya didukung pendanaan baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat secara langsung (Tugas Pembantuan) maupun melalui Pemerintah Propinsi Jawa Timur (Dekosentrasi) baik program/kegiatan maupun belanja rutin. Di samping itu juga tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini merupakan kekuatan yang akan menunjang kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.

3. Kelembagaan Pemerintah

Kelembagaan Pemerintah yang ada secara berjenjang telah sinergi (vertikal dan horizontal) dan komitmen pimpinan dalam pembangunan pertanian sangat tinggi, merupakan faktor kekuatan guna lancarnya pelaksanaan program di lapangan.

Adanya Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto. Hal ini didukung oleh adanya dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam mendukung visi dan misi pembangunan pertanian.

Adanya kemauan dan dedikasi aparatur Dinas Pertanian dalam Satuan Kerja Dinas Pertanian. Walaupun dengan jumlah aparatur yang terbatas, aparatur pertanian baik struktural maupun fungsional terus mengupayakan agar pembangunan pertanian terus dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Hal ini dapat dilakukan karena tingkat pendidikan aparatur cukup memadai yaitu rata-rata tingkat S1 sampai S2. Dengan semangat otonomi daerah dalam rangka membangun subsektor pertanian secara mandiri dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Ini harus digunakan sebagai kekuatan dalam membangun pertanian di Kabupaten Mojokerto, karena otonomi berada di tingkat kabupaten, jadi sudah seharusnya Kabupaten Mojokerto dengan segenap potensi yang ada dimanfaatkan untuk membangun daerah demi kemakmuran rakyat.

b. Kelemahan

1. Rendahnya kemampuan permodalan petani
2. Status petani
3. Kondisi lahan
4. Anomali Iklim
5. Adopsi inovasi teknologi petani yang rendah
6. Profesionalisme pelaku pertanian kurang sehingga produksi dan produktivitas pertanian rendah

c. Peluang

1. Lapangan kerja di bidang pertanian masih cukup luas
2. Percepatan pertumbuhan ekonomi
3. Penanggulangan kemiskinan
4. Permintaan produk pertanian tinggi (peluang pasar)
5. Dukungan dana pemerintah
6. Letak geografis sangat strategis

d. Ancaman

1. Adanya alih fungsi lahan pertanian produktif
2. Resiko usaha tani yang cukup tinggi
3. Harga jual produk pertanian sangat fluktuatif
4. Permodalan petani terbatas
5. Serangan organisme pengganggu tanaman
6. Kondisi ekonomi global/perdagangan bebas

3.4. Telaahan Renstra Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Beberapa faktor penghambat pelayanan:

1. Kecilnya luas penguasaan lahan serta tekanan degradasi dan alih fungsi lahan
2. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global
3. Terbatasnya infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air pertanian

Beberapa faktor pendorong pelayanan

1. Dukungan kebijakan dari provinsi dan pusat cukup baik berupa fasilitasi dan pendanaan
2. Pengembangan produk unggulan daerah dengan pengembangan klaster dan kawasan

Tabel. 19

Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto
Berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Kawasan Agropolitan tanaman pangan dan hortikultura meliputi beberapa desa di kawasan kecamatan Pacet	Pengembangan kawasan pertanian, perkebunan dan peternakan yang mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak	Belum ditetapkan pemetaan penetapan pengembangan kawasan berdasarkan potensi	Kebutuhan pangan makin meningkat dan memerlukan lahan pertanian yang memadai

		Sempitnya rata-rata kepemilikan lahan pertanian	Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian (pemukiman dan industri)	Adanya penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan
1	Kawasan Budidaya	Pengembangan kawasan peternakan dan perikanan yang mempunyai ke terkaitan dengan pusat distribusi pakan	Belum dilakukan pemetaan dan penetapan kawasan peternakan dan perikanan berdasarkan potensi	Minat peternak ter hadap komoditas ternak yang akan dikembangkan
		Peningkatan pengendalian pemotongan ternak ruminasia betina produktif		
		Meningkatnya kualitas kesehatan hewan dan produk pangan asal hewan melalui tindak pengamanan ternak sesuai dengan prosedur pengamanan bio security hazard		
		Mengoptimalkan fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk pelayanan dan perlindungan masyarakat		
		Peningkatan populasi ternak melalui peningkatan mutu genetik		
		Kawasan peternakan yang berpotensi penularan penyakit Zoonosis ditempatkan terpisah dengan pemukiman penduduk		

		Pengembangan kawasan peternakan diarahkan kepada pengembangan komoditas ternak unggulan daerah dengan keunggulan komparatif dan kompetitif		
--	--	--	--	--

Tabel 20

Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto
Berdasarkan Analisa KLHS

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya emisi gas rumah kaca yang menyebabkan anomali iklim	- Perubahan pola tanam dan serangan OPT pada tanaman pangan dan hortikultura dan perkebunan - Wabah penyakit hewan yang baru muncul dan menular ke manusia	Rendahnya pemanfaatan pupuk dan pestisida organik	Pergub Jatim Nomor 67 Tahun 2012 tentang RAD penurunan emisi gas rumah kaca
2	Tingginya alih fungsi lahan pertanian dan pemanfaatan ruang yang tidak memenuhi ketentuan teknis (tata ruang)	Belum maksimalnya tingkat produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Keterbatasan kepemilikan lahan	- Intensifikasi pertanian - Komitmen Kabupaten Mojokerto terhadap LP2B/KP2B
3	Seiring dengan meningkatnya popu lasi ternak meng akibatkan peningkatan emisi gas rumah	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis	Belum ada naskah akademis KLHS	Peraturan Perundangan KLHS

	kaca yang berasal dari kotoran ternak dan proses pencemaran, terutamanay berasal dari hewan ternak besar			
4	Kebanyakan peternak telah menerapkan eco-farming yaitu pengelolaan limbah ternak menjadi bahan yang bermanfaat seperti pupuk dan bio gas	Penetapan kawasan peternakan sesuai dengan potensi setempat		
3	Masih ada peme liharaan ternak yang dekat dengan per mukiman penduduk sehingga menimbulkan polusi, penyebaran penyakit hewan menular kepada manusia			
4	Semakin berkurang nya lahan pertanian akibat alih fungsi yang berdampak pada penyediaan lahan Hijauan Makanan Ternak (HMT)			

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada penentuan isu-isu strategis berdasarkan kinerja SKPD, tantangan dan peluang SKPD, identifikasi masalah berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD. Berikut tinjauan yang dilakukan antara lain :

1. Identifikasi isu-isu strategis (lingkungan eksternal)
2. Permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan sasaran renstra K/L beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya;
3. Permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan sasaran renstra SKPD beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya;
4. Permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan telaahan rencana tata ruang wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya
5. Matrik permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan analisis KLHS beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya
6. Rumusan isu-isu strategis

Tabel 21

Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertumbuhan penduduk dunia yang diikuti semakin besarnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, berdampak pada	Komiditi pangan nasional cenderung meningkat	Upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan di kabupaten Mojokerto masih rentan terhadap isu pemanasan global	

	makin terbatasnya ketersediaan pangan		yang berdampak terjadinya perubahan iklim	
2	Perubahan iklim global	Teknologi dan informasi pertanian masih kurang	Kelembagaan petani yang masih lemah, yang disebabkan masih relatif rendah nya kualitas sumber daya manusia petani dan beralihnya tenaga kerja sektor pertanian ke sektor industri	
3	Liberalisasi perdagangan dunia	Kemiskinan dan rawan pangan	Masih tingginya serangan hama penyakit pada komoditi pertanian, perkebunan dan peternakan berdampak terjadinya kehilangan produksi	
4	Gejolak perekonomian an global, berdampak pada ketidakpastian perkembangan harga komoditas, termasuk komoditi ekspor pertanian, perkebunan dan peternakan	Daya saing komoditas ekspor semakin ketat, dengan makin terbukanya perdagangan internasional	Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana pertanian, perkebunan dan peternakan	
5		Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian	Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian serta terjadinya degradasi sumberdaya alam	
6			Lemahnya akses petani terhadap permodalan, dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, alsintan) pendukung pengembangan sistem agribisnis	

7			Masih sedikitnya RPH yang berstandar SNI guna menjamin terpenuhinya standar aman, sehat, utuh dan halal.	
8			Masih banyaknya pemotongan illegal di luar RPH	

Persoalan ancaman dan kerawanan pangan dunia beberapa tahun terakhir selain berkaitan sangat erat dengan pertumbuhan penduduk juga sensitif terhadap perubahan iklim global. Ketidakstabilan ketahanan pangan, cenderung memicu terjadinya ketidakstabilan ekonomi maupun gejolak politik. Dalam hal ini, krisis pangan akan terjadi manakala tidak ada upaya - upaya yang serius untuk memperbaiki struktur produksi pangan. Isu Strategis harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan mengingat beberapa permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya akan menjadi dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Beberapa isu strategis yang mendesak untuk ditangani :

- a. Upaya pemenuhan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi pangan di kabupaten Sidoarjo masih rentan terhadap isu pemanasan global yang berdampak terjadinya perubahan iklim;
- b. Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian serta terjadinya degradasi sumber daya alam;
- c. Kelembagaan petani yang masih lemah, yang disebabkan masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia petani dan berkurangnya minat tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan
- d. Lemahnya akses petani terhadap permodalan, dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, alsintan) pendukung pengembangan sistem agribisnis;

- e. Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangantidak kontinyu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian;
- f. Masih ada pemeliharaan ternak yang dekat dengan pemukiman penduduk sehingga menimbulkan polusi
- g. Masih sedikitnya RPH yang berstandar SNI guna menjamin terpenuhinya standar aman, sehat, utuh dan halal.
- h. Masih banyaknya pemotongan illegal di luar RPH

Berdasarkan Hasil Review faktor-faktor pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto yang meliputi Anilsis Restra Kementrian Pertanian, Renstra SKPD Provinsi, analisis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Analisis KLHS, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

- a) Tidak sebandingnya luas areal sawah di Kabupaten Mojokerto dengan alsintan yang dimiliki Poktan/Gapoktan/UPJA
- b) Masih lemahnya ketersediaan input produk pertanian/sarana pertanian
- c) Serangan hama dan penyakit tanaman masih cukup tinggi
- d) Fenomena iklim yang tidak menentu sehingga mempengaruhi musim tanam, kerusakan tanaman, gagal panen, dll
- e) Konversi lahan yang tidak terkendali
- f) Keterbatasan dalam pencetakan lahan baru

- g) Penurunan kualitas lahan dengan degradasi sumber daya pertanian karena :
- Alih fungsi lahan
 - Kesuburan tanah ($BO < 2\%$)
 - Kerusakan lingkungan sehingga terbatas sumber air
- h) Rata-rata kepemilikan lahan sempit
- i) Tata guna dan tata kelola air belum optimal
- j) Kerusakan jaringan irigasi yang cukup tinggi
- k) Kerusakan jalan usaha tani yang sangat berpengaruh terhadap kehilangan hasil panen dan kelancaran pengangkutan hasil pertanian
- l) Adanya tuntutan perlakuan terhadap hewan ternak hendaknya mengikuti prinsip-prinsip kesejahteraan hewan (KESRAWAN), pengabaian terhadap kesrawan berpotensi menjadi salah satu hambatan dalam perdagangan internasional, perlu untuk mempercepat penerapan kesejahteraan hewan agar mampu meningkatkan daya saing produk di pasar bebas.
- m) Liberalisasi perdagangan dunia menimbulkan ancaman membanjirnya produk impor yang dapat mengancam kelangsungan usaha peternak lokal, usaha peternakan di kabupaten Mojokerto masih didominasi oleh para peternak dan petani skala kecil dan merupakan mata pencaharian. Salah satu dari sub sistem pertanian, dimana karakteristiknya adalah mempunyai lahan sempit, bermodal kecil dan produktivitas yang rendah sehingga diperlukan penumbuhan daya saing produk peternakan lokal

- n) Perubahan iklim global menyebabkan wabah penyakit-penyakit hewan yang baru muncul dan muncul kembali yang dapat menular kepada manusia (Zoonosis), Wabah Zoonosis dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap aspek ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan, Diperlukan pengendalian penyakit hewan menular yang lebih intensif.
- o) Terjadinya penurunan populasi ternak sapi potong, sapi perah dan kerbau sebesar 16,08 %, berdasarkan hasil sensus pertanian 2013, penurunan populasi ini dapat berpengaruh pada produksi hasil peternakan, Diperlukan usaha peningkatan populasi
- p) Belum terintegrasinya usaha peternakan dengan potensi lahan usaha yang tersedia, akibat belum terpadunya pengembangan wilayah dengan penetapan komoditas unggulan di setiap wilayah, sehingga menyulitkan dalam mengalokasikan kegiatan yang tepat untuk masing-masing wilayah tidak fokus serta menyebabkan input produksi menjadi relatif tinggi dan menurunkan daya saing produk, sehingga perlunya pemetaan dan penetapan kawasan sesuai dengan potensi wilayah.
- q) Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di Rumah Potong yang berstandar NKV (Nomor Kontrol Veteriner) guna menjamin terpenuhinya standar aman, utuh dan halal, Namun masih banyak pemotongan ilegal serta belum terdida RPH yang ber-NKV di kabupaten Mojokerto belum tersedia.
- r) Belum optimalnya kinerja sumber daya manusia di lapangan disebabkan belum meratanya kualitas pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan aspek teknis dan operasional yang menunjang tugas pokok dan fungsinya dalam bidang peternakan.

- s) Terbatasnya sarana dan prasarana operasional pembangunan dan pelayanan peternakan di lapangan, misalnya kendaraan operasional, pok Keswan, RPH, dll.)
- t) Masih terbatasnya kemampuan manajerial sebagian sumber daya manusia di lapangan, sehingga pengembangan pelayanan dan pembangunan bidang peternakan di lapangan masih relatif kurang optimal.
- u) Masih kurang mantapnya lembaga dan terbatasnya hasil kinerja petugas penyuluh di lapangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- v) Belum optimalnya tingkat akuntabilitas dan responsibilitas aparatur yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.
- w) Lemahnya daya saing atau unsur pembanding keberhasilan pembangunan di Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.
- x) Belum mantapnya tata administrasi dan manajemen pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto yang dapat dipakai sebagai acuan pembangunan administrasi dan manajemen di Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.
- y) Belum optimalnya tingkat profesionalitas aparatur yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, khususnya dalam menyikapi ranah globalisasi dan era teknologi informasi.

a. Upaya-Upaya untuk Keberhasilan

Berdasarkan analisis SWOT yakni kekuatan dan kelemahan organisasi yang berasal dari faktor internal dan eksternal Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, dan atas dasar isu-isu strategis yang berkembang terkait pelaksanaan tugas Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerrto, maka dirumuskan faktor kunci keberhasilan antara lain:

1. Mengoptimalkan kelembagaan di bidang pertanian agar berperanserta secara aktif dalam pembangunan, pengembangan dan mengoptimalkan hasil peternakan dan perikanan di wilayahnya.
2. Mengembangkan kerjasama dengan instansi swasta untuk pengembangan bidang pertanian antara lain menmgembangkan modal petani.
3. Memotivasi sumber daya manusia utamanya yang masih menganggur untuk aktif mengembangkan budi daya pertanian demi kesejahteraan diri, keluarga dan lingkungannya.
4. Mengotimalkan keanekaragaman hayati sebagai sumber makanan ternak dan mengembangkan hijauan makanan ternak
5. Meningkatkan sektor ekonomi dari hasil pertanian, perkebunan dan peternakan dengan memanfaatkan teknologi industri, sehingga hasil pertanian, perkebunan dan peternakan digunakan sebagai bahan baku olahan ikan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
6. Mengatasi kurangnya pemahaman sumber daya manusia terhadap pengetahuan dan ketrampilan operasional bidang pertanian, perkebunan dan peternakan dengan cara meningkatkan pengembangan pegawai melalui berbagai cara, antara lain panataran, pelatihan, lokakarya, seminar, dan pembuatan modul dalam bidang pertanian, perkebunan dan peternakan
7. Meningkatkan tersedianya sarana dan prasarana serta perlengkapan kerja bagi pelakasana di lapangan dan bagi pengembang bidang pertanian, perkebunan dan peternakan.

8. Meningkatkan tersedianya bahan makanan ternak dan ikan yang bebas residu.
9. Menciptakan dan memperluas lapangan kerja bidang pertanian, perkebunan dan peternakan.
10. Meningkatkan hasil kinerja sumber daya manusia dengan berbagai cara pengembangan yang tepat guna.
11. Meningkatkan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan peternakan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan penghematan sumber daya alam.

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum maksimalnya tingkat produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Menuurunnya daya dukung sumber daya alam akibat anomali iklim dan degradasi lahan	Kesuburan lahan yang makin menurun akibat pemakaian pupuk kimia yang berlebihan
		Sempitnya rata-rata kepemilikan lahan pertanian	Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian (pemukiman dan industri)
		Teknologi dan informasi pertanian masih kurang	Kelembagaan petani yang masih lemah yang disebabkan masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia petani dan beralihnya tenaga kerja sektor pertanian ke sektor industri
		Kurangnya ketersediaan infrastruktur, prasarana dan sarana pertanian yang memadai	Belum optimalnya pemanfaatan alat mesin pertanian (alsintan)
		Masih rendahnya kemampuan kelembagaan petani dalam akses teknologi, modal dan kemitraan	Sumber daya petani masih lemah

Tabel T-B-36
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kabupaten Mojokerto

No	Bidang urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
1	Pertanian		Tidak sebandingnya luas areal sawah di Kab. Mojokerto dengan alsintan yang dimiliki Poktan/Gapoktan/UPJA	Bantuan alsintan secara merata pada kelompok tani
			Kurangnya fasilitas (kuantitas dan kualitas) jaringan irigasi secara menyeluruh	Rehabilitasi jaringan irigasi dan irigasi perpompaan
			Kurangnya pengendalian serangan hama dan bencana banjir	Pengendalian OPT secara terpadu dan pembinaan melalui SLPHT dan P2AH
			Lahan semakin menyempit, irigasi mengalami banyak kendala, pupuk dan benih sulit diperoleh dan harga mahal	Komitmen terhadap KP2B, pengembangan pupuk organik dan usaha perbenihan di tingkat petani
			Penurunan kualitas lahan dengan degradasi sumber daya pertanian (antara lain unsur hara)	Perbaikan lahan dengan penambahan zat kapur/dolomit
			Minimnya ketersediaan infrastruktur, prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan	Pengembangan infrastruktur

			Kurangnya betina produktif dan capaian hasil Inseminasi Buatan masih belum luas	Penerapan program UPSUS SIWAB
			Penurunan jumlah peternak dan ternak	Pengembangan kawasan peternakan dan perbaikan kualitas perbibitan

BAB IV.

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan sasaran Kepala Daerah dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan Kepala Daerah adalah Meningkatkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada Agrobisnis, agroindustry, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.

Sedangkan tujuan OPD adalah

1. Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal menuju perekonomian daerah.
2. Meningkatnya Kesejahteraan Petani Melalui Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri

4.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional.

Sasaran yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis yang disertai dengan penetapan indikator, sasaran yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan/tolok ukur keberhasilan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas maka Dinas Pertanian menetapkan sasaran sebagai berikut:

Sasaran dari tujuan OPD yang pertama adalah:

Meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan:

Sedangkan indikator sasarannya adalah:

- Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan

Sasaran dari tujuan OPD yang kedua adalah:

Meningkatnya kesejahteraan petani

Sedangkan indikator sasarannya adalah

- Nilai Tukar Petani (NTP)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Sesuai dengan visi dan misi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut:

TABEL T.C-25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH HASIL REVIU

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke-		
				2024	2025	2026
1	Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal menuju perekonomian daerah	Meningkatnya produksi pertanian	Peningkatan produksi :			
			a). Padi (ton)	317.116,95	317.434,10	318.227,75
			b). Jagung (ton)	258.512,23	258.907,80	259.684,48
			c). Kedelai (ton)	1.955,00	1.960,00	1.964,94
			d). Cabai (ton)	11.282,37	11.293,70	11.321,89
			e). Bawang Merah (ton)	7.477,03	7.486,70	7.520,44
			f). Tebu (ton)	502.686,38	502.750,00	502.760,00
			g). Tembakau (ton)	3.885,50	3.900,00	3.950,00

			h). Kopi (ton)	330,52	331,00	331,50
			i). Cengkeh (ton)	32,50	33,00	33,50
			j). Kakao (ton)	108,00	108,50	109,00
			k). Daging (kg)	47.695.918	47.750.000	48.000.000
			l). Telur (kg)	12.393.537	12.500.000	12.700.000
			m). Susu (kg/lt)	4.851.814	4.900.000	5.000.000
2	Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan agrobisnis dan agroindustri	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	116.75	116.77	116.79

Keterangan: Produksi tebu berubah dari produksi gula pada Renstra awal (2021-2023) menjadi produksi tebu lahan (2024-2026)

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi sebagai pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi membentuk suatu pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Strategi mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis, permasalahan permasalahan yang dihadapi, peluang, ancaman maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal diperlukan untuk dapat menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*) bagi suatu organisasi sehingga organisasi tersebut dapat selalu merespon setiap perubahan yang terjadi. Lingkungan internal adalah kondisi internal dalam suatu organisasi yang dapat berpengaruh terhadap capaian kinerja suatu organisasi, sementara lingkungan eksternal adalah situasi dan kondisi di sekitar organisasi yang secara langsung berpengaruh pada organisasi. Kedua lingkungan ditelaah dengan menggunakan analisa SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*) untuk mengidentifikasi faktor-faktor baik internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan maupun eksternal yakni peluang dan tantangan yang akan menjadi elemen strategi organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dalam proses pencapaian tujuan dalam bentuk Matrik IFAS/EFAS.

Kekuatan (*Strength*), yaitu situasi dan kemampuan internal bersifat positif yang memungkinkan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto memiliki keuntungan strategis dalam mencapai visi dan misi meliputi :

- Adanya komitmen pemerintah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas
- Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur yang berpendidikan D3, S1 dan S2 mencukupi untuk melaksanakan Tupoksi Dinas
- Adanya dukungan Stakeholders (perusahaan yang bergerak dibidang pertanian, perkebunan dan peternakan serta kelompok tani dan ternak)

Kelemahan (*Weaknesses*) yaitu situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto tidak dapat atau gagal dalam mencapai visi dan misi adalah :

- Kurang tersedianya sarana prasarana pendukung
- Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar dan permodalan serta perlindungan usaha tani
- Kuantitas Sumber Daya Manusia aparatur yang kurang memadai
- Belum optimalnya kelembagaan petani dan infrastruktur pertanian

Peluang (*Opportunities*) yaitu situasi dan faktor-faktor luar bersifat positif yang membantu Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto :

- Meningkatnya kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap komoditi pertanian, perkebunan dan peternakan
- Meningkatnya Perkembangan dan kemajuan teknologi pertanian, perkebunan dan peternakan dari proses produksi di hulu hingga pengolahan di hilir
- Terbukanya pangsa pasar untuk produk pertanian, perkebunan dan peternakan serta produk olahannya

Tantangan (*Threats*) adalah unsur pada lingkungan eksternal yang dapat mempersulit pencapaian tujuan.

- Menurunnya daya dukung sumber daya alam akibat anomali iklim dan, degradasi lahan
- Semakin ketatnya Persaingan pasar global
- Alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian (pemukiman dan industri)
- Berkurangnya minat tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan (Kelangkaan SDM)
- Fluktuasi harga komoditi pertanian perkebunan dan peternakan

5.1.1. Strategi

Mengacu pada strategi pembangunan pertanian tahun 2019-2024 (Kementerian Pertanian), maka Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto menggunakan strategi dalam pencapaian sasaran, yaitu:

1. Menjadikan basis produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura
2. Menyediakan prasarana dasar bidang pertanian
3. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk pertanian
4. Memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

5.1.2. Kebijakan SKPD

Kebijakan untuk urusan pertanian, pada umumnya ditekankan untuk kemandirian ekonomi dan kerakyatan, meliputi:

1. Kebijakan peningkatan ketahanan pangan (padi, jagung, kedelai, cabai dan bawang merah) yang berdampak bagi perekonomian.

2. Kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani dengan fokus pada penguatan kelembagaan, prasarana, sarana dan permodalan usaha pertanian dalam arti luas.
3. Kebijakan peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDM di bidang pertanian
4. Kebijakan peningkatan nilai tambah hasil pertanian dengan fokus pada pengembangan produk unggulan daerah.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : **Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

MISI 2 : Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal menuju perekonomian daerah	Meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan)	Upaya pengembangan hasil pertanian yang terintegrasi mulai dari hulu ke hilir, serta mulai dari produksi, distribusi dan pemasaran dengan mengutamakan keberpihakan kepada petani dan masyarakat pengguna hasil pertanian	Kemandirian ekonomi dan kerakyatan
2. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan agrobisnis dan agroindustri	Meningkatkan kesejahteraan petani	Upaya pengembangan hasil pertanian yang terintegrasi mulai dari hulu ke hilir, serta mulai dari produksi, distribusi dan pemasaran dengan mengutamakan keberpihakan kepada petani dan masyarakat pengguna hasil pertanian	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, maka langkah langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program-program pembangunan pertanian, perkebunan dan peternakan dalam perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 antara lain :

a. ***Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan***

Program dan kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Indikator program ini adalah persentase sarana pertanian yang digunakan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan Sub. Kegiatan:
 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi (DBHCHT dan DAK NF P2L)
 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 - Pengawasan penggunaan sarana pasca panen tanaman pangan
 - Pengawasan penggunaan sarana pasca panen tanaman hortikultura

2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kab/Kota, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan dan Tumbuhan
 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tumbuhan

3. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kab/Kota dengan sub kegiatan meliputi:
 - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Tanaman Skala Kecil
4. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer dengan sub kegiatannya:
 - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan, Peredaran Obat Hewan
5. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kab/Kota, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
 - Pengawasan produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak, bahan pakan/pakan
 - Penjaminan peredaran benih/bibit ternak
 - Penjaminan peredaran hijauan pakan ternak, bahan pakan/pakan
 - Pengendalian penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak
6. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Pengadaan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah kab/kota lain
 - Pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari daerah kab/kota lain

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Indikator program ini adalah persentase prasarana pertanian yang digunakan. Sedangkan kegiatannya meliputi:

1. Pengemban Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
 - Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan
2. Pembangunan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
 - Pembangunan, rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi ternak
 - Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
 - Pembangunan dan rehabilitasi prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan
 - Pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan operasional Puskesmas
 - Pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan operasional Rumah Potong Hewan

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Indikator program ini adalah Persentase penurunan kejadian penyakit menular, dengan kegiatan yang meliputi:

1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kab/Kota, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Pelaksanaan surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada hewan
 - Pelaksanaan penyidikan penyakit hewan dan zoonosis pada hewan
 - Pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kab/kota
2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kab/Kota, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Penilaian resiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan
 - Analisa resiko penyakit hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya
3. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kab/Kota, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Penyediaan pelayanan jasa laboratorium
 - Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner
4. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan
 - Pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner
 - Pembinaan penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan

- Pengelolaan penerbitan, rekomendasi pdmasuk dan pengeluaran sertifikat veteriner dan SKKH/SKPH hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (HPM)
- Pengawasan unit usaha produk hewan

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana

Indikator Program ini adalah Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian, dengan kegiatan:

Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kab/Kota, dengan sub kegiatan meliputi:

- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan hortikultura dan perkebunan
- Pencegahan penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan hortikultura dan perkebunan

b. Meningkatnya kesejahteraan petani

Untuk sasaran kedua yaitu meningkatnya kesejahteraan petani, didukung program dan kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Program ini merupakan program rutin Dinas Pertanian untuk operasional dinas dalam rangka mencapai nilai SAKIP “A”.

Kegiatannya meliputi:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi:

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-PD
- Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-PD

- Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-PD
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-PD
 - Evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi:
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun PD
3. –Administras Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, meliputi:
- Pembinaan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi:
- Penyediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi:
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan bahan/material
 - Fasilitasi kunjungan tamu
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - Penatausahaan arsip dinamis pada PD
 -

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi:
 - Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Indikator program adalah Persentase usulan rekomendasi izin usaha pertanian kab/kota yang terfasilitasi dengan kegiatan:

Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kab/Kota, dengan sub kegiatan:

- Pengawasan pelaksanaan izin usaha fasilitas pemeliharaan hewan

6. Program Penyuluhan Pertanian

Indikator Program ini adalah persentase peningkatan score kelas kelompok tani. Tujuannya adalah supaya kelompok tani bisa tumbuh dan berkembang mandiri, dengan kegiatan meliputi:

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
 - Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif pada Reviu Renstra Tahun 2024-2026 pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF (HASIL REVIU RENSTRA) DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2024 - 2026 SESUAI PERMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021														
Unit Organisasi		: 3.27.0.00.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN												
Sub Unit Ogranisasi		: 3.27.0.00.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN												
Misi ke-2		: Membangun kemandirian ekonomi yg berdimensi kerakyatan												
Tujuan Daerah		: Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada Agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah												
Indikator Tujuan Daerah		: 1). Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi												
		: 2). Indeks Gini												
Sasaran Daerah		: 1). Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan daerah (Indikator : PDRB)												
		: 2). Meningkatnya Kesejahteraan Petani Melalui Pengembangan agro bisnis dan agro industri (Indikator : Nilai Tukar Petani)												
Tujuan OPD	Sasaran OPD	Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN						Kondisi kinerja pada akhir periode renstra OPD	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Target 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1). Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal menuju perekonomian daerah				PDRB (ADHB) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (dalam juta rupiah)			7,687,741.30 juta rupiah		7,687,741.30 juta rupiah		8,712,762.20 juta rupiah	8,712,762.20 juta rupiah	Dinas Pertanian	
	Meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan)			Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan :			6.784.167.157		16.450.844.770		14.812.500.000	38.047.511.927	Dinas Pertanian	
				1). Tanaman Pangan dan Hortikultura :										
				a). Padi (ton)	305.874,16	317.116,95		317.434,10		318.227,65		318.227,65		
				b). Jagung (ton)	155.838,81	258.512,23		258.907,80		259.684,48		259.684,48		
				c). Kedelai (ton)	1.263,50	1.955,00		1.960,00		1.964,94		1.964,94		
				d). Cabai (ton)	5.804,78	11.282,37		11.293,70		11.321,89		11.321,89		
				e). Bawang Merah (ton)	5.453,60	7.477,03		7.486,70		7.520,44		7.520,44		
				2). Perkebunan :										
				a). Tebu (ton)	45.065,18	502.686,38		502.750,00		502.760,00		502.760,00		
				b). Tembakau (ton)	2.048,00	3.885,50		3.900,00		3.950,00		3.950,00		
				c). Kopi (ton)	2.048,00	330,52		331,00		331,50		331,50		
				d). Cengkeh (ton)	35,60	32,50		33,00		33,50		33,50		

							e). Kakao (ton)	98,20	108,00		108,50		109,00		109,00		
							3). Peternakan:										
							a). Daging (kg)	18.141.449,00	47.695.918		47.750.000		48.000.000		48.000.000		
							b). Telur (kg)	2.673.229,00	12.393.537		12.500.000		12.700.000		12.700.000		
							c). Susu (kg/lit)	4.485.400,00	4.851.814		4.900.000		5.000.000		5.000.000		
		3	27	02			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang Digunakan	95%	3.251.543.970	98%	8.356.984.650	99%	7.445.500.000	19.054.028.620		
		3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian yang dilaksanakan sesuai ketentuan	5 jenis	4 jenis	2.891.770.600	100%	4.823.506.400	100%	5.060.000.000	12.775.277.000	
		3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan spesifikasi lokasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi	2 laporan	2.902.883.000	2 laporan	3.953.506.400	2 laporan	4.030.000.000	10.886.389.400	Bidang Tan Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan	
							- Kegiatan DBHCHT			2.252.883.000		3.628.506.400		3.700.000.000	9.581.389.400	Bidang Perkebunan Dinas Pertanian	
							- Kegiatan DAK NF (P2L)			650.000.000		325.000.000		330.000.000	1.305.000.000	Bidang Tan Pangan dan Hortikultura	
		3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	- 3 laporan	238.887.600	5 laporan	700.000.000	5 laporan	850.000.000	1.550.000.000	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian	
							- Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura									Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian	
							- Fasilitasi produksi bawang merah		3 laporan	238.887.600		100.000.000	3 kecamatan	125.000.000	463.887.600	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian	
							- Fasilitasi produksi jagung		-	-		300.000.000	1 kecamatan	350.000.000	650.000.000	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian	
							- Fasilitasi produksi cabai		-	-		100.000.000	1 kelompoktani	125.000.000	225.000.000	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian	

						- Fasilitas produksi kedelai			-	-	100.000.000	2 kelompok tani	125.000.000	225.000.000	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian		
						- Fasilitas produksi padi			-	-	100.000.000	550 bibit	125.000.000	225.000.000	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian		
		3	27	02	2.01	0014	Pengawasan penggunaan sarana pasca panen tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pasca panen tanaman pangan	-	-	40.000.000	1 laporan	45.000.000	85.000.000	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian		
						- Monitoring dan evaluasi bantuan pasca panen tanaman pangan			-	-	40.000.000		45.000.000	85.000.000	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian		
		3	27	02	2.01	0016	Pengawasan penggunaan sarana pasca panen tanaman hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pasca panen tanaman hortikultura	-	-	130.000.000	12 laporan	135.000.000	265.000.000	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian		
						- Fasilitas dan pendampingan bantuan sarana pasca panen hortikultura			-	-	130.000.000		135.000.000	265.000.000			
		3	27	02	2.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase SDG yang dikelola sesuai ketentuan	3 jenis	2 jenis	100.000.000	100%	68.000.000	1,00	70.000.000	238.000.000		
		3	27	02	2.02	0002	Peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman		1 dok	50.000.000	-	-	50.000.000	Bidang Peternakan Dinas Pertanian		
		3	27	02	2.02	0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan dan Tanaman	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	-	1 VUB	50.000.000	1 laporan	68.000.000	70.000.000	188.000.000	Bidang Peternakan Dinas Pertanian	
						- Fasilitas bantuan benih itik dan sarana prasarannya			-		68.000.000	5 jenis	70.000.000	138.000.000	Bidang Peternakan Dinas Pertanian		
		3	27	02	2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan yang terjamin mutunya	3 jenis		-	100%	36.382.000	3 jenis	45.000.000	81.382.000		
		3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil	-		-	1 laporan	36.382.000	45.000.000	81.382.000	Bidang Peternakan Dinas Pertanian	
						- Monitoring dan evaluasi mutu benih/bibit ternak/pakan ternak			-		36.382.000		45.000.000	81.382.000	Bidang Peternakan Dinas Pertanian		
		3	27	02	2.04	Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer	Persentase obat di tingkat pengecer yang terawasi sesuai ketentuan	1 kegiatan		-	100%	42.446.250	1 kegiatan	45.500.000	87.946.250		
		3	27	02	2.04	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat, dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar	-		-	1 laporan	42.446.250	45.500.000	87.946.250	Bidang Kewan Dinas Pertanian	
Reviu Rencana Strategis Dinas Pertanian Kab. Mojokerto 2024 – 2026											-		42.446.250	45.500.000	87.946.250	Bidang Kewan Dinas Pertanian	

		3	27	02	2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian dan pengawasan penyediaan benih/bibit ternak dan HPT yang terlaksana sesuai ketentuan	3 jenis	100%	1.055.913.700	100%	1.550.000.000	3 jenis	1.650.000.000	4.255.913.700			
		3	27	02	2.05	0005	Pengendalian penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	150 ton	63.733.700	-	-	-	-	63.733.700	Bidang Peternakan Dinas Pertanian		
		3	27	02	2.05	0006	Pengawasan produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak, bahan pakan/pakan	Jumlah pengawasan produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak, bahan pakan/pakan	22 kelompok	4 laporan	42.180.000	5 laporan	475.000.000	5 laporan	550.000.000	1.067.180.000	Bidang Peternakan Dinas Pertanian	
							- Laporan Statistik Peternakan					125.000.000	2 jenis	150.000.000	275.000.000	Bidang Peternakan Dinas Pertanian		
							- Kontes Ternak			-		350.000.000		400.000.000	750.000.000	Bidang Peternakan Dinas Pertanian		
		3	27	02	2.05	0008	Penjaminan peredaran benih/bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	-	250.000.000	4 laporan	425.000.000	4 laporan	450.000.000	1.125.000.000	Bidang Peternakan Dinas Pertanian		
							- Fasilitas honor petugas IB					125.000.000		150.000.000	275.000.000	Bidang Peternakan Dinas Pertanian		
							- DID (penyediaan bibit ternak sapi perah)		15 ekor sapi perah	250.000.000	15 ekor sapi perah	300.000.000	15 ekor sapi perah	300.000.000	850.000.000	Bidang Peternakan Dinas Pertanian		
		3	27	02	2.05	0009	Penjaminan peredaran hijauan pakan ternak, bahan pakan/pakan	Jumlah hijauan pakan ternak, bahan pakan yang beredar		450.000.000		300.000.000		300.000.000	1.050.000.000	Bidang Peternakan Dinas Pertanian		
							- DID (penyediaan hijauan pakan ternak sapi perah dan unggas)		bibit tan indigofera seluas 6 ha, konsentrat sapi 10 ton, pakan starter 4.800 kg dan pakan layer 80 zak	450.000.000	bibit tan indigofera seluas 6 ha, konsentrat sapi 10 ton, pakan starter 4.800 kg dan pakan layer 80 zak	300.000.000	bibit tan indigofera seluas 6 ha, konsentrat sapi 10 ton, pakan starter 4.800 kg dan pakan layer 80 zak	300.000.000	1.050.000.000	Bidang Peternakan Dinas Pertanian		
		3	27	02	2.05	0010	Pengendalian penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang tersedia		250.000.000		350.000.000		350.000.000	950.000.000	Bidang Peternakan Dinas Pertanian		
							- DID (penyediaan bibit ternak kambing dan semen beku sexing)		56 ekor kambing, sexing 1.500 ton dan konsentrat sapi perah 6 ton	250.000.000	56 ekor kambing, sexing 1.500 ton dan konsentrat sapi perah 6 ton	350.000.000	56 ekor kambing, sexing 1.500 ton dan konsentrat sapi perah 6 ton	350.000.000	700.000.000	Bidang Peternakan Dinas Pertanian		
		3	27	02	2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase penyediaan benih/bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak sesuai ketentuan	2 jenis		217.553.370	100%	1.836.650.000	100%	575.000.000	2.629.203.370			
		3	27	02	2.06	0002	Pengadaan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah kab/kota lain	Jumlah hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah kab/kota lain	-	1,5 ton	63.733.700	1 ton	60.650.000	1 ton	65.000.000	189.383.700	Bidang Peternakan Dinas Pertanian	

							- Pengadaan bibit rumput odot dan sarprasnya		-		15 ekor	60.650.000	15 ekor	65.000.000	125.650.000	Bidang Peternakan Dinas Pertanian		
		3	27	02	2.06	0003	Pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari daerah kab/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	-	1 jenis	153.819.670	20 ekor	1.776.000.000	20 ekor	510.000.000	2.439.819.670	Bidang Peternakan Dinas Pertanian	
							- Fasilitas bantuan ternak kambing			40 ekor	153.819.670		146.000.000		160.000.000	459.819.670	Bidang Peternakan Dinas Pertanian	
							- Bantuan ternak (POKIR)			172 ekor			350.000.000		350.000.000	700.000.000	Bidang Peternakan Dinas Pertanian	
							Pengadaan bibit sapi perah (mendukung Pengembangan Kawasan Perdesaan)				40 ekor		920.000.000	20 ekor	460.000.000	1.380.000.000	Bidang Peternakan Dinas Pertanian	
							Pengadaan bibit sapi potong (mendukung Pengembangan Kawasan Perdesaan)				20 ekor		360.000.000	20 ekor	360.000.000	720.000.000	Bidang Peternakan Dinas Pertanian	
		3	27	03			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian Yang Digunakan	20%	20%	1.648.500.000	100%	4.948.489.120	100%	5.210.000.000	11.806.989.120		
		3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pengembangan prasarana pertanian yang terlaksana sesuai ketentuan	2 kegiatan	2 kegiatan	623.500.000	100%	1.109.489.120	1,00	1.190.000.000	2.922.989.120		
		3	27	03	2.01	0001	Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LPCP2B)	Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LPCP2B) yang dikelola		1 dokumen	155.000.000	-	-	-	-	155.000.000	Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian	Tidak dilaksanakan
		3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	-	2 laporan	468.500.000	2 laporan	884.489.120	2 laporan	940.000.000	2.292.989.120	Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Perkebunan	
							- DBHCHT				400.000.000	1 laporan	800.000.000	1 laporan	850.000.000	1.650.000.000	Bidang Perkebunan Dinas Pertanian	
							- Monitoring dan evaluasi pupuk bersubsidi		65 kios & 9 distributor		68.500.000	1 laporan	84.489.120	1 laporan	90.000.000	174.489.120	Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian	
		3	27	03	2.01	0010	Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	-		-	5 unit	225.000.000	5 unit	250.000.000	475.000.000	Bidang Perkebunan Dinas Pertanian	
Reviu Rencana Strategis Dinas Pertanian Kab. Mojokerto 2024 – 2026																		
		3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab	5 unit		1.325.000.000	7 unit	3.839.000.000	7 unit	4.020.000.000	9.184.000.000		

			3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun			950.000.000	5 unit		1.194.000.000	3 unit		1.320.000.000	2.514.000.000		
								- Pembangunan/ Renovasi Gudang Tembakau (DBHCHT)			1 unit	800.000.000	1 unit		400.000.000	1 unit		450.000.000	850.000.000	Bidang Perkebunan Dinas Pertanian	
								- Rehabilitasi Pasar Hewan		-	1 unit	150.000.000	1 unit		250.000.000	1 RPU		300.000.000	550.000.000	Bidang Peternakan Dinas Pertanian	
								- Pembangunan kandang komunal sapi perah		-		-	2 unit		400.000.000	2 unit		420.000.000	820.000.000	Bidang Peternakan Dinas Pertanian	
								- Pembangunan kandang komunal sapi potong					1 unit		144.000.000	1 unit		150.000.000	294.000.000	Bidang Peternakan Dinas Pertanian	
			3	27	03	2.02	0011	Pembangunan, Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Jumlah prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi		-		1 unit		2.000.000.000	1 unit		2.000.000.000	4.000.000.000	Bidang Keswan Dinas Pertanian	
								- Pembangunan laboratorium pakan ternak (mendukung PAD)				-			2.000.000.000			2.000.000.000	4.000.000.000		
			3	27	03	2.02	0012	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara		-		1 unit		125.000.000	1 unit		130.000.000	255.000.000	Bidang Peternakan Dinas Pertanian	
								- Fasilitas Lab yang direhab							125.000.000			130.000.000	255.000.000		
			3	27	03	2.02	0013	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan	Jumlah prasarana untuk UPTD BIB yang dibangun dan direhabilitasi			-	1 unit		100.000.000	1 unit		110.000.000	210.000.000		
								- Fasilitas Balai Inseminasi (belakang Puskesmas Puri)		-		-			100.000.000			110.000.000	210.000.000		
			3	27	03	2.02	0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan operasionalisasi Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	-	5 unit	300.000.000	3 unit		300.000.000	3 unit		330.000.000	930.000.000	Bidang Keswan Dinas Pertanian	
								- Rehabilitasi dan operasional puskesmas Gondang, Puri dan Dawarbandong			2 unit	300.000.000			300.000.000	3 unit		330.000.000	930.000.000		
			3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasional Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	-	3 unit	75.000.000	1 unit		120.000.000	1 unit		130.000.000	325.000.000	Bidang Peternakan Dinas Pertanian	
								- Rehab RPH Mojosari							120.000.000			130.000.000	250.000.000		
			3	27	04			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular			494.000.000	49%		1.975.371.000	49%		2.157.000.000	4.626.371.000		

		3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penjaminan kesehatan hewan yang dilaksanakan			250.000.000	3 jenis	932.575.000	3 jenis	1.000.000.000	2.182.575.000		
		3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada hewan	- 1 laporan		250.000.000	18 wilayah	250.000.000	18 wilayah	275.000.000	775.000.000	Bidang Keswan Dinas Pertanian	
							- Surveilans penyakit hewan						250.000.000		275.000.000	525.000.000		
		3	27	04	2.01	0006	Pelaksanaan penyidikan penyakit hewan dan zoonosis pada hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan penyakit hewan dan zoonosis pada hewan	-			500 kasus	250.000.000	600 kasus	275.000.000	525.000.000	Bidang Keswan Dinas Pertanian	
							- Penyidikan penyakit hewan di seluruh wilayah Kab. Mojokerto						250.000.000		275.000.000	525.000.000		
		3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kab/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kab/kota	-			1 laporan	432.575.000	1 laporan	450.000.000	882.575.000	Bidang Keswan Dinas Pertanian	
							- Pemberantasan penyakit hewan						432.575.000		450.000.000	882.575.000		
		3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keamanan hewan dan produk hewan hasil pengawasan sesuai ketentuan	-		44.130.000	100%	90.956.000	1,00	100.000.000	235.086.000		
		3	27	04	2.02	0001	Penilaian resiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan	Jumlah penilaian resiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan	- 1 laporan		44.130.000		-		-	44.130.000	Bidang Keswan Dinas Pertanian	
		3	27	04	2.02	0007	Analisa Resiko Penyakit Hewan, Zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisa resiko penyakit hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	200 sampel		-	300 sampel	90.956.000	400 sampel	100.000.000	190.956.000	Bidang Keswan Dinas Pertanian	
		3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jenis pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner yang dilaksanakan			139.900.000	3 jenis	400.000.000	3 jenis	450.000.000	850.000.000		
		3	27	04	2.03	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah pelayanan jasa laboratorium	1 laporan		139.900.000	12 laporan	250.000.000	12 laporan	275.000.000	525.000.000	Bidang Keswan Dinas Pertanian	APBD DAN DAK NF
		3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	-		-	12 laporan	150.000.000	12 laporan	175.000.000	325.000.000	Bidang Keswan Dinas Pertanian	
		3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner yang terselenggara			59.970.000	100%	531.840.000	100%	582.000.000	1.113.840.000		
		3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	-			1 laporan	106.840.000	1 laporan	120.000.000	226.840.000	Bidang Keswan Dinas Pertanian	
		3	27	04	2.04	0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner	- 1 dok		59.970.000	12 dokumen	250.000.000	12 dokumen	275.000.000	525.000.000	Bidang Keswan Dinas Pertanian	

		3	27	04	2.04	0005	Pembinaan penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi	-	-	-	16 unit	75.000.000	16 unit	80.000.000	155.000.000	Bidang Keswan Dinas Pertanian	
		3	27	04	2.04	0006	Pengelolaan penerbitan, rekomendasi pemasukan dan pengeluaran, sertifikat veteriner dan SKKH/SKPH hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (HPM)	Jumlah rekomendasi pemasukan dan pengeluaran, sertifikat veteriner dan SKKH/SKPH HPM	-	-	-	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	55.000.000	105.000.000	Bidang Keswan Dinas Pertanian	
		3	27	04	2.04	0010	Pengawasan unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi dengan cara yang baik	-	-	-	16 unit	50.000.000	16 unit	52.000.000	102.000.000	Bidang Keswan Dinas Pertanian	
		3	27	04	2.05		Penerapan dan pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Hew an	Persentase pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan yang terselenggara sesuai ketentuan	-		-	100%	20.000.000		25.000.000	45.000.000		
		3	27	04	2.05	0003	Pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	-	-	-	5 unit	20.000.000	5 unit	25.000.000	45.000.000	Bidang Keswan Dinas Pertanian	
		3	27	05			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Fasilitas Penanggulangan Bencana Pertanian		60%	1.390.123.187	100%	1.170.000.000	100%		3.810.123.187		
		3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang dilaksanakan			1.390.123.187	2 jenis	1.170.000.000	2 jenis	1.250.000.000	3.810.123.187		
		3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			790.123.187	200 ha	1.100.000.000	250 ha	1.160.000.000	3.050.123.187	Bidang Tan Pangan & Hortikultura, Bidang Perkebunan	
							- Pengadaan stok obat-obatan tanaman pangan dan hortikultura			140.123.187		400.000.000		450.000.000	990.123.187	Bidang Tan Pangan & Hortikultura, Bidang Perkebunan		
							- Gerdal OPT Kakao			-		50.000.000		60.000.000	110.000.000	Bidang Perkebunan Dinas Pertanian		
							-DID (Pengadaan obat Rhodentisia)			650.000.000		650.000.000		650.000.000	1.950.000.000	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian		
		3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah area terdampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang ditangani				2 ha	70.000.000	2,5 ha	90.000.000	160.000.000	Bidang Tan Pangan & Hortikultura, Bidang Perkebunan	
		3	27	05	2.01	0003	Pencegahan penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah luasan pencegahan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan hortikultura dan perkebunan		100 ha	600.000.000				600.000.000	Bidang Tan Pangan & Hortikultura, Bidang Perkebunan		

								- DBHCHT										
2). Meningkatkan Kesejahteraan Petani Melalui Pengembangan agro bisnis dan agro industri								Nilai Tukar Petani			30.211.944.033		28.265.756.000		29.146.750.000		87.624.450.033	
	Meningkatnya Kesejahteraan Petani							Nilai Tukar Petani	116.69	116.75		116.77		116.79	29.146.750.000		88.930.845.033	
		3	27	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				30.211.944.033		26.900.756.000		27.775.250.000		84.887.950.033	
							Nilai SAKIP perangkat daerah		84,4 (A)		15.000.000	84,7 (A)	23.000.000	85 (A),00	28.000.000		66.000.000	
		3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD yang disusun		5 dokumen	15.000.000	5 dokumen	23.000.000	5 dokumen	28.000.000		66.000.000	
		3	27	01	2.01	0001	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	7.500.000	2 dokumen	7.500.000	2 dokumen	10.000.000		25.000.000	Perencanaan
		3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD	Jumlah dokumen RKA-PD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-PD	-	-	-	56 dok	2.000.000	56 dok	2.000.000		4.000.000	Keuangan
		3	27	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-PD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-PD	-	-	-	36 dokumen	2.000.000	36 dokumen	2.000.000		4.000.000	Keuangan
		3	27	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-PD	Jumlah dokumen DPA-PD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-PD		-	-	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.000.000		4.000.000	Keuangan
		3	27	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-PD	Jumlah dokumen DPA-PD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-PD		-	-	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.000.000		4.000.000	Keuangan
		3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja OPD yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	7.500.000	3 dokumen	7.500.000	3 dokumen	10.000.000		25.000.000	Perencanaan
							Nilai SAKIP perangkat daerah		84,4 (A)			84,7 (A)	23.477.356.000	85 (A),00	24.251.750.000			
		3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah		100%	28.056.150.000	91%	23.477.356.000	100%	24.251.750.000		75.785.256.000	
		3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	28.050.000.000	170 org/bin	15.250.000.000	170 org/bin	15.750.000.000		59.050.000.000	Keuangan
		3	27	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	3 dokumen	3 dokumen	6.150.000	12 dokumen	8.225.856.000	12 dokumen	8.500.000.000		16.732.006.000	Keuangan
		3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun PD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun PD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun PD	-	-	-	3 laporan	1.500.000	3 laporan	1.750.000		3.250.000	Keuangan
							Nilai SAKIP perangkat daerah		84,8 (A)		255.675.700	84,7 (A)	3.400.400.000	85 (A),00	3.495.500.000		7.151.575.700	
		3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada Perangkat Daerah yang berfungsi baik		93%	255.675.700	95%	30.000.000	95%	40.000.000		325.675.700	
		3	27	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada PD		-	-	1 laporan	30.000.000	1 laporan	40.000.000		70.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian
							Nilai SAKIP perangkat daerah		84,8 (A)		255.675.700	84,7 (A)	2.816.400.000	85 (A),00	2.893.500.000			

		3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah		85 (Nilai)	255.675.700	86 (Nilai)	210.000.000	87 (Nilai)	232.000.000	697.675.700		
		3	27	01	2.05	0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	-	315 setel	141.750.000	170 paket	200.000.000	170 paket	220.000.000	561.750.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
		3	27	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	9 orang tim PAK	100 ASN	113.925.700	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	12.000.000	135.925.700	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
								Nilai SAKIP perangkat daerah		84,8 (A)	533.330.900	84,7 (A)	3.176.400.000	85 (A),00	3.174.000.000	6.883.730.900		
		3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan kebutuhan umum perangkat daerah		100%	533.330.900	100%	1.401.400.000	100%	1.395.500.000	3.330.230.900		
		3	27	01	2.06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15 jenis	25 jenis	51.975.000	5 paket	300.000.000	5 paket	350.000.000	701.975.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
		3	27	01	2.06	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	-	-	-	4 paket	25.000.000	4 paket	27.000.000	52.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
		3	27	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	54.885.000	4 paket	250.000.000	4 paket	270.000.000	574.885.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
		3	27	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	33 jenis	18 jenis	68.607.000	4 paket	45.000.000	18 jenis	35.000.000	148.607.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
		3	27	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-	12 jenis	12.500.000	12 dokumen	26.400.000	12 dokumen	30.000.000	68.900.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
		3	27	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket/bahan/material yang disediakan	38 jenis	50 jenis	80.430.000	4 paket	15.000.000	4 paket	16.500.000	111.930.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
		3	27	01	2.06	0008	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 bulan	12 bulan	13.721.400	1 laporan	15.000.000	1 laporan	17.000.000	45.721.400	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
		3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi PD	294 OH	12 bulan	251.212.500	12 laporan	600.000.000	12 laporan	650.000.000	1.501.212.500	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
		3	27	01	2.06	0010	Penatausahaan arsip dinamis pada PD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada PD	-	-	-	1 dokumen	125.000.000	1 dokumen	127.000.000	252.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
								Nilai SAKIP perangkat daerah		84,8 (A)	-	84,7 (A)	46.095.600.770	85 (A),00	45.379.250.000	91.474.850.770		
		3	27	01	2.07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase realisasi kebutuhan BMD pada PD	-	-	-	100%	650.000.000	100%	675.000.000	1.325.000.000		
		3	27	01	2.07	0001	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	-	-	-	1 unit	650.000.000	1 unit	675.000.000	1.325.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	

							Nilai SAKIP perangkat daerah		84,8 (A)	579.747.000	84,7 (A)	849.000.000	85 (A),00	871.500.000	2.300.247.000		
		3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyelenggaraan jasa penunjang pemerintah daerah yang terselenggara sesuai ketentuan	100%	579.747.000	100%	484.000.000	100%	500.000.000	1.563.747.000		
		3	27	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Bulan	12 bulan	292.215.000	12 laporan	255.000.000	12 laporan	265.000.000	812.215.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian
		3	27	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	144 OB	12 Orang/Bulan	287.532.000	12 laporan	229.000.000	12 laporan	235.000.000	751.532.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian
							Nilai SAKIP perangkat daerah		84,8 (A)	516.364.733	84,7 (A)	1.840.000.000	85 (A),00	1.869.500.000	4.225.864.733		
		3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) pada PD yang berfungsi baik	93%	516.364.733	100%	625.000.000	100%	653.000.000	1.794.364.733		
		3	27	01	2.09	0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	32 kali	40 kali	103.033.600	7 unit	200.000.000	7 unit	220.000.000	523.033.600	Subbagian Umum dan Kepegawaian
		3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	1 gedung	1 gedung	337.444.933	1 unit	350.000.000	1 unit	355.000.000	1.042.444.933	Subbagian Umum dan Kepegawaian
		3	27	01	2.09	/0010	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	144 unit	375 jenis	75.886.200	5 unit	75.000.000	5 unit	78.000.000	228.886.200	Subbagian Umum dan Kepegawaian
		3	27	06			Progam Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usulan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian Kab/Kota yang terfasilitasi	95%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	16.500.000	46.500.000		
							Nilai SAKIP perangkat daerah		84,8 (A)	15.000.000	84,7 (A)	15.000.000	85 (A),00	44.175.750.000	44.205.750.000		
		3	27	06	2.02		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi izin usaha yang terbit	95%	15.000.000	95%	15.000.000	95%	16.500.000	46.500.000		
		3	27	06	2.02	0003	Pengawasan pelaksanaan izin usaha fasilitas pemeliharaan hewan	Jumlah izin usaha fasilitas pemeliharaan hewan yang diawasi	-	25 lap	15.000.000	1 laporan	15.000.000	1 laporan	16.500.000	46.500.000	Bidang Peternakan Dinas Pertanian

		3	27	07			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Score Kelas Kelompok Tani		4,50%	1.291.395.000	5,00%	1.350.000.000	5,00%	1.355.000.000	3.996.395.000		
								Nilai SAKIP perangkat daerah		84,8 (A)	1.291.395.000	84,7 (A)	1.350.000.000	85 (A),00	1.355.000.000	3.996.395.000		
		3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah unit BPP yang melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian	18 unit		1.291.395.000	18 unit	1.350.000.000	18 unit	1.355.000.000	3.996.395.000		
		3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya			800.000.000	18 unit	1.200.000.000	18 unit	1.200.000.000	3.200.000.000	Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian	
							- DBHCHT		120 orang	5 kali	700.000.000	6 kali	800.000.000	6 kali	800.000.000	2.300.000.000		
							- DAK Non Fisik						200.000.000		200.000.000	400.000.000		
							- Programe Penyuluhan Tingkat Kecamatan dan Kabupaten		18 BPP		100.000.000		200.000.000		200.000.000	500.000.000		
		3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	460 kelompok	675 orang	138.840.000	40 unit	150.000.000	40 unit	155.000.000	443.840.000	Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian	
		3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana pendukung Balai Penyuluhan Pertanian yang disediakan (DAK Fisik)	- 3 BPP		352.555.000	-	-	-	-	352.555.000	Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian	
											38.302.506.190		44.716.600.770		43.959.250.000	128.228.356.960		

BAB VII.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto menjabarkan indikator kinerjanya yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian dan sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto.

Program pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dalam perubahan Renstra diimplementasikan dalam berbagai kegiatan pembangunan pertanian yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Indikator kinerja dalam Reviu Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto tahun 2024-2026 merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian visi dan misi dinas dalam melaksanakan program-program pembangunan di Kabupaten Mojokerto pada kurun waktu 2024-2026. Penetapan indikator kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan PDRB Sektor Pertanian
2. Peningkatan produksi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), hortikultura (bawang merah dan cabai), perkebunan (tebu, tembakau, kopi, cengkeh dan kakao), peternakan (daging, telur dan susu)
3. Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)

Indikator Kinerja Dinas Pertanian yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dipaparkan pada tabel di bawah ini:

Tabel T.C-28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
(Hasil Reviu Renstra 2024-2026)

No.	Indikator		Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Peningkatan produksi :						
	1). Tanaman Pangan dan Hortikultura						
	a.	Padi (ton)	305.874,16	317.116,95	317.434,10	318.227,75	318.227,75
	b.	Jagung (ton)	155.838,81	258.512,23	258.907,80	259.684,48	259.684,48
	c.	Kedelai (ton)	1.263,50	1.955,00	1.960,00	1.964,94	1.964,94
	d.	Cabai (ton)	5.804,78	11.282,37	11.293,70	11.321,89	11.321,89
	e.	Bawang Merah (kw)	5.453,60	7.477,03	7.486,70	7.520,44	7.520,44
	2). Tanaman perkebunan						
	a.	Tebu (ton)	45.065,18	502.686,38	502.750,00	502.760,00	502.760,00
	b.	Tembakau (ton)	2.048,00	3.885,50	3.900,00	3.950,00	3.950,00
	c.	Kopi (ton)	2.048,00	330,52	331,00	331,50	331,50
	d.	Cengkeh (ton)	35,60	32,50	33,00	33,50	33,50
	e.	Kakao (ton)	98,20	108,00	108,50	109,00	109,00
	3). Peternakan :						
	a.	Daging (kg)	18.141.449,00	47.695.918	47.750.000	48.000.000	48.000.000
	b.	Telur (kg)	2.673.229,00	12.393.537	12.500.000	12.700.000	12.700.000
	c.	Susu (kg/lt)	4.485.400,00	4.851.814	4.900.000	5.000.000	5.000.000

2	Peningkatan Nilai Tukar Petani	116.69	116.75	116.77	116.79	116.79
---	--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Keterangan:

Produksi tebu berubah dari produksi gula pada Renstra awal (2021-2023) menjadi produksi tebu lahan (2024-2026)

VIII. PENUTUP

Dalam mengantisipasi perkembangan pada masa yang akan datang, ditengah-tengah persaingan yang semakin tajam, maka Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dituntut untuk mempersiapkan diri dan secara terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan dengan melalui tahapan-tahapan yang konsisten dan berkelanjutan serta berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang optimal. Dokumen Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024-2026 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan maupun 3 (tiga) tahun mendatang yang berorientasi pada peningkatan PDRB sektor pertanian dengan indikator sasaran peningkatan produksi pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan serta dalam mencapai sasaran yang kedua yaitu meningkatnya kesejahteraan petani dengan peningkatan NTP . Perumusan dan penyusunan perencanaan strategis (RENSTRA) mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto, Renstra Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto 2012-2032.

Dokumen ini diharapkan dapat mensinergiskan pembangunan pertanian, perkebunan dan peternakan di Kabupaten Mojokerto untuk 3 (tiga) tahun ke depan, yaitu tahun 2024-2026. Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan seperti yang tertuang dalam Renstra ini tidak lepas dari peran serta seluruh stakeholder agribisnis khususnya di Kabupaten Mojokerto dengan mempertimbangkan optimalisasi potensi sumber daya alam dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian.

Reviu Rencana Strategis Dinas Pertanian tahun 2024-2026 merupakan acuan bagi pembangunan pertanian di Kabupaten Mojokerto yang bersifat fleksibel dan dinamis sepanjang proses pembangunan pertanian sesuai dengan visi dan misi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan.

Dengan Reviu Rencana Strategis ini, diharapkan akan terjadi sinkronisasi program antar instansi/lembaga terkait dengan pembangunan pertanian di Kabupaten Mojokerto

Mojokerto, 29 Desember 2023
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Mojokerto



NURUL ISTIQOMAH, SE, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19711116 199703 2 00